

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL TNI
DI WILAYAH PAPUA GUNA MENJAGA KEUTUHAN NKRI**

Oleh :

BUDIARSO, S.E.
KOLONEL MAR NRP. 10427/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Optimalisasi Pembinaan Teritorial TNI Di Wilayah Papua Guna Menjaga Keutuhan NKRI”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap Kepada para Peserta PPRA LXIII untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 1 Juli 2022

Penulis

BUDIARSO, S.E.

KOLONEL MAR NRP. 10427/P



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budiarmo, S.E.

Pangkat : Kolonel Marinir NRP 10427/P

Jabatan : Aspotmar Pangkoarmada III

Instansi : TNI AL

Alamat : Jl. Jayawijaya II no. 15 Cilandak Timur Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Kaya Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



BUDIARMO, S.E.
KOLONEL MAR NRP. 10427/P

DAFTAR ISI

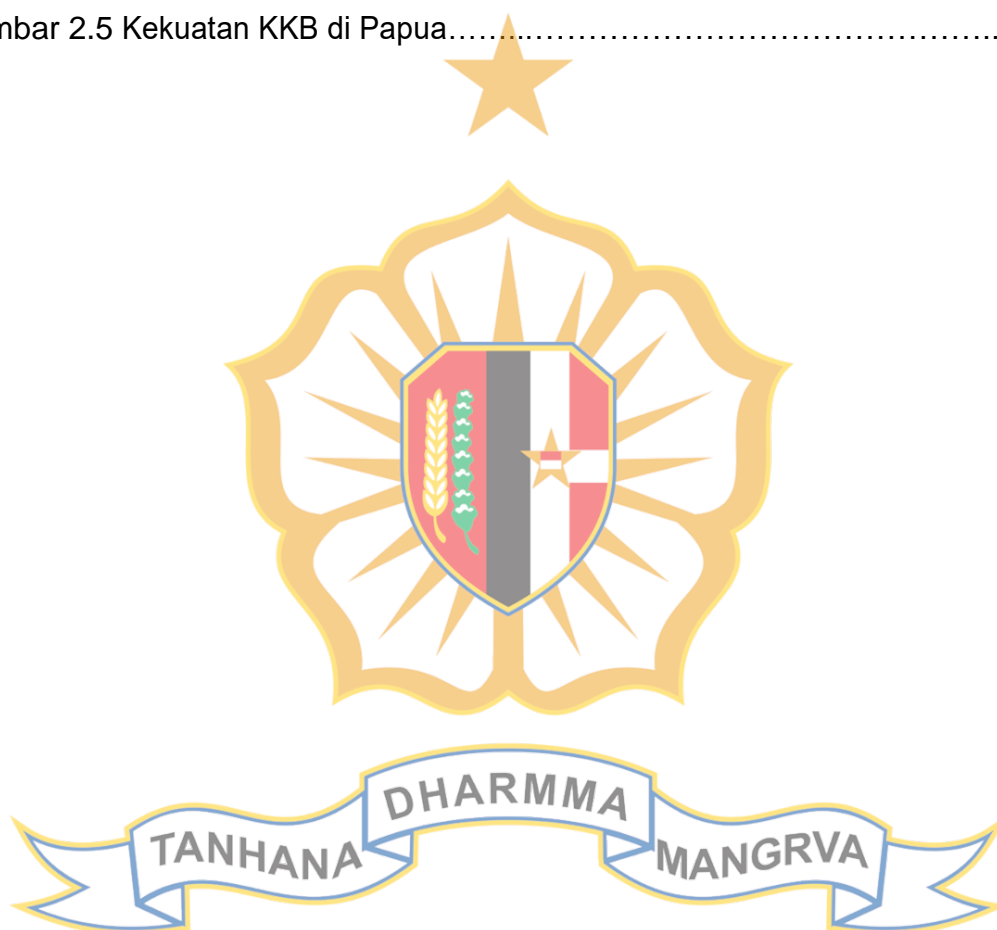
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	6
6. Pengertian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
7. Umum.....	9
8. Peraturan Perundang-undangan.....	9
9. Kerangka Teoritis.....	11
10. Data dan Fakta.....	13
11. Lingkungan Strategis.....	16
BAB III PEMBAHASAN.....	25
12. Umum.....	25
13. Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil)	26
14. Komunikasi Sosial (Komsos) TNI.....	31
15. Bakti TNI	36
16. Kemampuan Aparat Teritorial TNI.....	41
BAB IV PENUTUP.....	45
17. Simpulan	45

18. Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR LAMPIRAN :	
1. ALUR PIKIR	
2. TABEL	
3. DAFTAR GAMBAR	
4. RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Satuan Teritorial TNI di Papua.....	14
Gambar 2.2. Perkembangan PDRB Papua, 2021.....	22
Gambar 2.3. Penduduk usia kerja dan Angkatan kerja Papua.....	22
Gambar 2.4. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Papua.....	23
Gambar 2.5 Kekuatan KKB di Papua.....	24



OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL TNI DI WILAYAH PAPUA GUNA MENJAGA KEUTUHAN NKRI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Sistem Pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan semua komponen masyarakat Indonesia, wilayah serta Sumber Daya Nasional yang ada di dalamnya yang didayagunakan dalam menjaga keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertindak sebagai alat negara di bidang pertahanan, dalam menjalankan fungsinya bertumpu pada kebijakan dan keputusan politik negara, dengan tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sekaligus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 telah disebutkan bahwa TNI memiliki tugas memberdayakan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), dilaksanakan dengan jalan melaksanakan Pembinaan Teritorial TNI baik secara mandiri maupun bersama aparaturnya dan seluruh elemen bangsa akan turut membantu pemerintah untuk mempersiapkan kekuatan pertahanan di darat, di laut dan di udara, beserta kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemandirian TNI dan Rakyat, yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tugas pokok TNI.²

¹ Undang-undang RI no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

² Prof. Ir. Mansur Ma'shum, Ph.D., 2009, PEMBINAAN TERITORIAL DALAM Mendukung KETAHANAN NASIONAL (weebly.com) diakses 27 Januari 2022 pukul 19.00 Wib.

Papua merupakan wilayah NKRI terletak di bagian timur merupakan daerah Otonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam undang-undang tersebut, diberikan berbagai kekhususan pada penerapan otonomi daerah antara lain pertama Provinsi Papua dan Papua Barat bisa memilih bendera daerah serta lagu daerah sebagai lambang daerah tersebut, kedua mempunyai Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural, ketiga Kepala Daerah di provinsi Papua harus putra daerah asli tersebut, keempat perimbangan pendapatan daerah Papua lebih besar dan kelima Putra dan Puteri asli Papua mendapatkan jalur khusus didalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).³

Namun dalam perkembangannya situasi di Papua, terdapat beberapa permasalahan antara lain ekonomi, politik dan keamanan. Yang menjadi topik utama selalu bersinggungan dengan perekonomian Papua yang masih tertinggal dari wilayah lain di Indonesia dan selalu muncul konflik bahkan sampai pada isu atas pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Berdasarkan permasalahan tersebut muncullah kelompok-kelompok yang tidak puas yang ingin memisahkan diri dari NKRI yang merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan mendirikan Organisasi Papua Merdeka sehingga hal itu merupakan cikal bakal terjadinya fragmentasi yang menyebabkan disintegrasikan bangsa. Gerakan ini muncul sehingga menyebabkan keresahan masyarakat dan telah memakan banyak korban jiwa sehingga menambah beban permasalahan pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, hal ini diperparah dengan kerentanan ketahanan wilayah yang tidak mampu menghadapi segala bentuk ancaman yang bisa terjadi.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai upaya telah berusaha untuk mencegah terjadinya konflik di Papua antara lain dengan membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua dengan melakukan dialog kebangsaan sebagai sarana

³ Fina Dea, 2022, Kekhususan Provinsi Papua - Berikut Jawabannya (rumusrumus.com) diakses tanggal 24 Maret 2022 pukul 20.30 Wib

untuk menghadirkan pihat terkait dalam membahas berbagai isu guna menciptakan stabilitas keamanan di Papua, melakukan pendekatan *soft power diplomacy* dengan negara-negara yang mempunyai kepedulian terhadap Papua dan Papua Barat, serta melaksanakan pendekatan keamanan dan penegakkan Hukum.

Namun sejauh ini masih terjadi gangguan keamanan yang menelan korban jiwa baik dari TNI/Polri maupun masyarakat sipil. Sepanjang tahun 2022 ada tujuh aksi brutal kekejaman KKB di Papua yang telah menelan korban 18 prajurit TNI dan warga sipil. Sebanyak 13 korban orang di antaranya meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya luka-luka.⁴ Seluruh korban sedang melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan membangun sarana dan prasarana serta menjaga keamanan wilayah.

Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI di Papua yaitu Kogabwilhan III, Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari, Koarmada III maupun Koopsud III telah melaksanakan upaya dalam penyelesaian konflik Papua dengan melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) di wilayah kerja masing masing yang meliputi kegiatan pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil), Komunikasi Sosial (Komsos), melaksanakan Bakti TNI dan Pembinaan Kemampuan aparat Teritorial (Binpuanter). Hal ini dilakukan untuk mencegah konflik melalui jalan damai tidak dengan jalan kekerasan. Namun yang dilakukan oleh Satkowil TNI tersebut belum berfungsi secara optimal karena masih terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan jatuhnya korban di Papua.

Agar optimalisasi Pembinaan Teritorial TNI di wilayah Papua mencapai kondisi yang diharapkan, maka perlu adanya peningkatan pembinaan Ketahanan wilayah, Komunikasi sosial, bakti TNI dan pembinaan kemampuan aparat teritorial TNI sehingga memungkinkan penerapan metode Pembinaan Teritorial yang tepat dan spesifik terkait dengan permasalahan yang ada di Papua.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis Menyusun Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul **“Optimalisasi Pembinaan Teritorial TNI di Wilayah Papua guna Menjaga Keutuhan NKRI”**.

⁴ Ariedwie Satrio, 2022, Sindonews.com, 13 Orang Tewas Akibat 7 Penyerangan Brutal KKB Papua Sepanjang 2022 (sindonews.com), diakses 23 Juni 2022 pukul 19.00 Wib

2. Rumusan Masalah.

Saat ini TNI di Papua telah dibentuk Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI yang terdiri dari Kodam XVII/Cenderawasih, Kodam XVIII/Kasuari, Koarmada III dan Koopsud III, namun demikian dalam pelaksanaan Binter di wilayah Papua masih terbatas, sehingga perlu dioptimalkan agar mampu menjaga keutuhan NKRI, dengan rumusan masalah “Bagaimana optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI?”

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, berdasarkan data dan fakta yang ada serta pendekatan teori yang relevan, maka disusunlah pokok persoalan atau pertanyaan kajian yang akan dibahas dalam Taskap ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pembinaan Ketahanan Wilayah yang sudah dilaksanakan oleh TNI di Papua?
- b. Bagaimana Komunikasi Sosial TNI yang sudah dilaksanakan di Papua?
- c. Bagaimana program Bakti TNI yang sudah dilaksanakan di Papua?
- d. Bagaimana kemampuan aparat Teritorial TNI dalam melaksanakan Binter di Papua?

3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Dalam penulisan taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi dari permasalahan yang akan dibahas terkait optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI.

b. Tujuan.

Adapun tujuan dari penulisan Taskap ini agar dapat menjadi sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan terkait optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup dalam Taskap ini dibatasi pada optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat yang diperkirakan dapat menghambat, menghalangi, maupun menggagalkan pelaksanaan tugas TNI guna menjaga keutuhan NKRI.

b. Sistematika.

Dalam penyusunan Taskap ini terdapat empat bab yang sistematis dan saling terkait satu dengan yang lain, yaitu:

- 1) Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini akan yang akan dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, Metode dan Pendekatan serta beberapa pengertian terkait optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI.
- 2) Bab II: Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis menurut para pakar yang diambil dari buku-buku teks yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan didukung data/fakta, serta dibahas lingkungan strategis yang berpengaruh baik global, regional maupun nasional yang berkaitan dengan optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI.
- 3) Bab III : Pembahasan. Dalam bab ini memuat tentang analisis yang tergambar secara obyektif tentang optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI, di dalam permasalahan-permasalahan antara lain membahas pembinaan ketahanan wilayah, komunikasi sosial TNI, kemampuan aparat Teritorial TNI dalam melaksanakan Binter serta program Bakti TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI.
- 4) Bab IV : Penutup. Dalam bab ini akan menguraikan simpulan yang memuat pokok-pokok dari pembahasan penulisan atas masalah

yang dikemukakan sebelumnya disertai rekomendasi kepada *stake holder* terkait yang substansinya memuat harapan dan kemungkinan tindak lanjut dari para pengambil keputusan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan akan diimplementasikan dalam optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI.

5. Metode dan Pendekatan.

a. Metode.

Dalam penulisan kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini, metode yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif dan kajian kepustakaan. Analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam tulisan ini memfokuskan pada analisa persoalan berdasarkan tema-tema dan isu-isu yang sifatnya strategis dan ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas, sedangkan studi kepustakaan menitik-beratkan pada upaya pencarian bahan-bahan tertulis terkait optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI.

b. Pendekatan.

Adapun dalam penulisan Taskap menggunakan pendekatan Ketahanan Nasional secara luas (*komprensif*), menyeluruh (*holistik*), dan dalam satu kesatuan (*integralistik*).

6. Pengertian.

a. **Optimalisasi.** adalah suatu cara, proses dan tindakan untuk menjadi yang terbaik atau tertinggi. Sedangkan menurut definisi Winardi (1999:363) tentang optimasi adalah suatu ukuran untuk mencapai suatu tujuan.⁵

b. **Pembinaan Teritorial** (Binter) adalah upaya pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan oleh TNI secara perorangan, kelompok maupun satuan melalui Komsos, Bintahwil dan Bakti TNI untuk membangun kemandirian

⁵ Mingseli, 2020, <https://www.mingseli.id/2020/11/pengertian-optimalisasi-menurut-para-ahli.html>, diakses 5 Februari 2022 pukul 20.15 Wib.

TNI-Rakyat dan Pemberdayaan wilayah pertahanan secara dini, dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang Tangguh.⁶

c. Bintangwil adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI secara berdiri sendiri atau bersama pemerintah/LPNK dan komponen bangsa lainnya dalam membangun peran serta masyarakat menjadi kekuatan pertahanan wilayah, perlawanan rakyat dan bela negara dengan kemampuan tangkal yang dimiliki dalam rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di wilayah.⁷

d. Komsos adalah kegiatan komunikasi TNI dengan masyarakat, Pemerintah, keluarga besar TNI dan komponen bangsa lainnya untuk membangun kedekatan, meyelami permasalahan, penyampaian informasi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi rasa cinta tanah air, berwawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.⁸

e. Bakti TNI adalah kegiatan yang dilaksanakan atas Kerjasama antara TNI dengan pemerintah, kementerian/LPNK, instansi terkait serta masyarakat baik atas permintaan masyarakat, pemerintah atau atas inisiatif sendiri dalam rangka mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan ketahanan wilayah.⁹

f. NKRI adalah kependekan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI memiliki berbagai macam ciri khas, yakni kebhinekaan suku, kebudayaan, dan agama. Kebhinekaan tersebut tercermin dalam satu ikatan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu juga.¹⁰

⁶ Mabes TNI, 2016, Serbuan Teritorial, Jakarta

⁷ Ibid

⁸ ibid

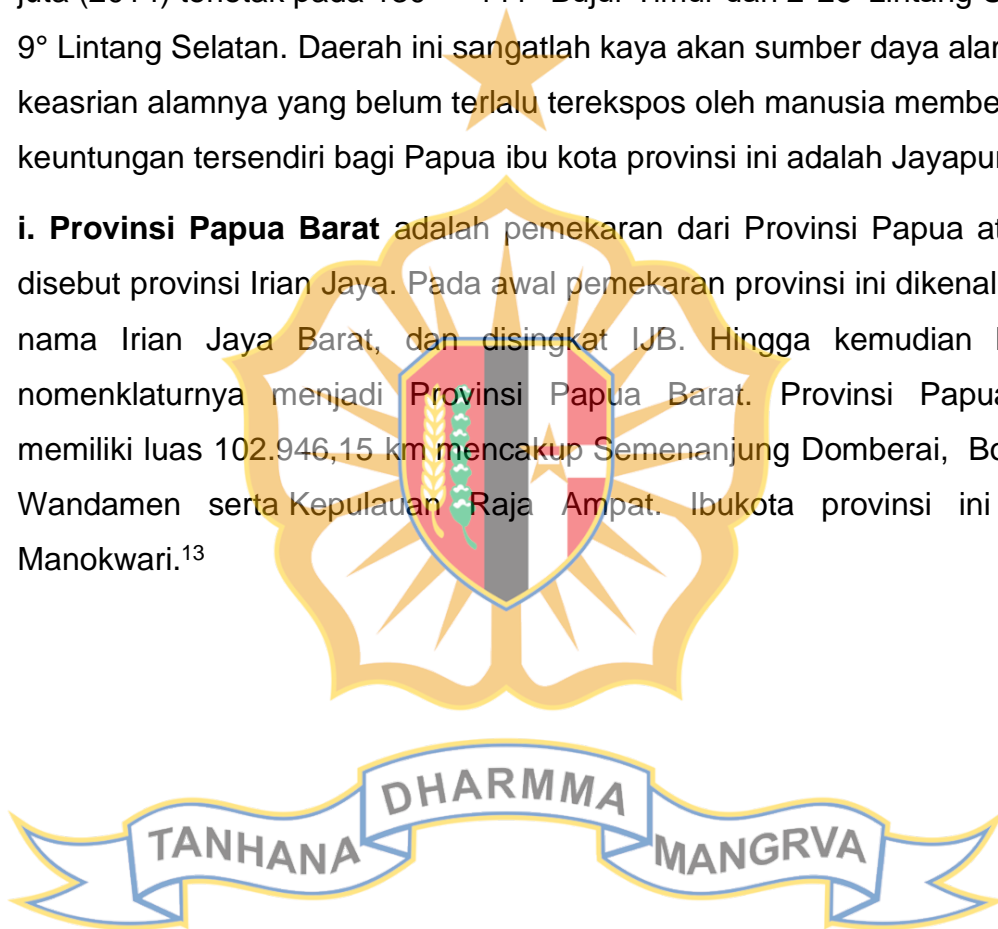
⁹ Ibid

¹⁰ Rahmat Hidayat, 2021, Pengertian NKRI: *Latar Belakang, Tujuan, Fungsi, Bentuk dan Pentingnya Menjaga Keutuhan*, Pengertian NKRI: Latar Belakang, Tujuan, Fungsi, Bentuk dan Pentingnya Menjaga Keutuhan (wawasankebangsaan.id), diakses 26 Juni 2022 pukul 14.00 Wib

g. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.¹¹

h. Provinsi Papua adalah provinsi yang berada dikawasan Indonesia timur. memiliki luas daerah 317.062 Km² dengan jumlah penduduk 3,486 juta (2014) terletak pada 130° – 141° Bujur Timur dan 2°25' Lintang Utara – 9° Lintang Selatan. Daerah ini sangatlah kaya akan sumber daya alam, keasrian alamnya yang belum terlalu terekspos oleh manusia memberikan keuntungan tersendiri bagi Papua ibu kota provinsi ini adalah Jayapura¹²

i. Provinsi Papua Barat adalah pemekaran dari Provinsi Papua atau dulu disebut provinsi Irian Jaya. Pada awal pemekaran provinsi ini dikenal dengan nama Irian Jaya Barat, dan disingkat IJB. Hingga kemudian berubah nomenklturnya menjadi Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat memiliki luas 102.946,15 km mencakup Semenanjung Domberai, Bomberai, Wandamen serta Kepulauan Raja Ampat. Ibukota provinsi ini adalah Manokwari.¹³



¹¹ Undang Undang RI nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

¹² Rizal, 2018, ilmugeografi.com, Sekilas Tentang Provinsi di Papua - IlmuGeografi.com, diakses 23 Juni 2022 pukul 20.00 wib

¹³ Media Pustaka Papua, 2020, Profil Daerah Papua Barat » Media Pustaka Papua - Media Berita, diakses 23 Juni 2022 pukul 20.15 Wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Sesuai amanat Reformasi, penentuan dan pengerahan TNI adalah menjalankan perannya sebagai alat negara di bidang pertahanan. Sebagai Tentara profesional, TNI memiliki komitmen untuk memisahkan diri dari keterlibatannya dalam kebijakan praktis dari pemerintah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis. Untuk itu TNI harus tunduk pada politik negara yang dijalankan oleh otoritas pemerintah yang telah dipilih oleh rakyat sesuai nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI selalu memenuhi kewajiban negara untuk mencapai tujuan nasional. Untuk menguraikan tentang optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI diperlukan tinjauan pustaka sebagai referensi dalam pembahasan selanjutnya.

8. Peraturan Perundang-Undangan.

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI, antara lain:

- a. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** UU ini bertujuan mengatur pertahanan negara guna melindungi dan mempertahankan kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah NKRI dari berbagai bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan sejak dini untuk menyesuaikan diri dengan sistem pertahanan negara dengan mengupayakan penguatan dan peningkatan membangun kapasitas dan ketahanan bangsa dan negara, serta mengatasi segala ancaman. Penyelenggaraan pertahanan negara terhadap ancaman militer dilaksanakan oleh TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk menangkal ancaman

nonmiliter, peran organisasi pemerintah di luar sektor pertahanan merupakan faktor kunci yang menyesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman serta dibantu oleh faktor kekuatan nasional lainnya.¹⁴

b. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.** Pada Pasal 7 ayat 8 dijelaskan bahwa memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta¹⁵, dengan demikian dihadapkan keberadaan Komando kewilayahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sangat efektif untuk pemberdayaan wilayah pertahanan bagi kepentingan pertahanan negara. Sedangkan pada sub ayat 9 dijelaskan bahwa Tugas pokok TNI membantu tugas pemerintah di daerah, ini berarti bahwa keberadaan komando kewilayahan akan dapat membantu tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah.

c. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.** Dalam UU dijelaskan bahwa Provinsi Papua yang sebelumnya adalah Provinsi Irian Jaya telah mendapat otonomi khusus dalam NKRI. Di sisi lain, otonomi khusus merupakan kekuasaan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai aspirasi dan hak-hak dasar rakyat Papua.¹⁶ Jadi terlepas dari UU tersebut, TNI memiliki kewenangan penuh dalam memberikan keamanan di wilayah salah satunya melalui pembinaan teritorial untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan dari KKB.

d. **Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI** sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI pada pasal 95 Kodam melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayahnya dalam rangka

¹⁴ UU RI Nomor 3 Tahun 2002, Tentang Pertahanan Negara.

¹⁵ UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁶ UU RI Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

mendukung tugas pokok TNI, pasal 131 Koarmada membina potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut dan pasal 153 Dinas Potensi Kedirgantaraan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan potensi kedirgantaraan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara.

9. Kerangka Teoretis.

a. Teori Pemberdayaan Wilayah.

Rappaport (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses, suatu mekanisme, dalam hal ini, individu, organisasi dan masyarakat di suatu daerah akan masalah-masalah yang mereka hadapi. Secara umum, teori Pemberdayaan mengasumsikan bahwa tindak pemberdayaan yang dilakukan akan berbeda untuk individu dan daerah yang berbeda di mana persepsi, keahlian dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tertentu, misalnya ketenagakerjaan akan berbeda dengan persoalan kedudukan lainnya seperti tingkat kesehatan ibu hamil dan persoalan remaja.¹⁷

Dalam pemberdayaan aspek kewilayahan dan aspek pertahanan, esensi pemberdayaan wilayah pertahanan dapat uraikan sebagai berikut:

- 1) Membantu Pemerintah dalam mempersiapkan potensi nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan, dengan meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, persiapan awal untuk melakukan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya berpedoman pada kepentingan pertahanan negara dengan sistem pertahanan semesta.
- 2) Membantu pemerintah mengadakan pelatihan dasar wajib militer bagi warga negara menurut standar hukum.
- 3) Membantu pemerintah menggalang kekuatan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

¹⁷ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

b. Teori Perang menurut Sun Tzu.

Teori perang Sun Tzu, telah meletakkan landasan penting bagi profesionalisme berperang, yaitu: mengenal musuh dan kenali diri sendiri, maka anda bisa berperang seribu kali tanpa terancam gagal. Artinya untuk menghadapi peperangan perlu diketahui secara pasti sifat ancaman dan musuh yang akan dihadapi serta memahami kekuatan pasukan sendiri untuk menghadapi perang. Kesuksesan bukanlah melakukan apa yang perlu dilakukan. Kesuksesan adalah "melampaui" apa yang perlu dilakukan. Sehingga untuk sukses, Anda harus melampaui "aturan-aturan biasa" serta menetapkan standar baru untuk sukses. Maka Anda harus mengalahkan rekor Anda sendiri.¹⁸

c. Teori Sosial Budaya.¹⁹

Menurut Andreas Eppink: sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Sosial budaya dapat memberikan dampak-dampak tersendiri bagi masyarakat sekitar. Dampak ini dapat berupa positif dan negatif.

- 1) Dampak positifnya bisa berupa:
 - a) Sebagai pedoman dalam hubungan antara manusia dengan komunitas atau kelompoknya.
 - b) Sebagai petunjuk atau tata cara tentang bagaimana manusia harus berperilaku dalam kehidupan sosialnya.
 - c) Sebagai modal dan dasar dalam pembangunan kehidupan manusia.
- 2) Dampak negatifnya adalah:
 - a) Menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan ekosistem alam.
 - b) Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuknya tingginya tingkat kriminalitas.

¹⁸ Gerald Michaelson, 2003, *Sun Tzu for Succes*, USA, Adam Media Cooperation

¹⁹ Selasar, 2022, Sosial Budaya: Pengertian, Sistem, Perubahan, Aspek & Proses (selasar.com) diakses 23 Juni 2022 pukul 22.00 Wib

- c) Mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan batin dan moral yang biasanya dekat dalam hubungan sosial antar masyarakat.

d. Teori Strategi Moral

Mubarakhsyah, Persia abad 13 dalam Bukunya *Rules of War and Bravery*.²⁰ Dalam teori ini dijelaskan rahasia memotivasi orang dan memelihara moral mereka adalah menjadikan mereka lebih memikirkan tentang kelompok daripada diri sendiri. Coba libatkan mereka dalam suatu perjuangan, perang suci terhadap musuh yang mereka benci. Jadikan mereka memandang kelangsungan hidup mereka terkait dengan sukses pasukan secara keseluruhan. Dalam kelompok di mana orang telah benar benar menjadi ikatan suasana hati dan emosi adalah demikian menularnya sehingga mudah sekali mempengaruhi pasukan dengan antusiasme.

Masyarakat Papua perlu dimotivasi dan ditingkatkan moralnya agar lebih memikirkan tentang NKRI daripada diri sendiri dengan melibatkannya dalam perjuangan memerangi saudara saudara mereka yang berseberangan dengan kita yang tergabung dalam KKB. Mereka dilibatkan dalam suatu perjuangan perang suci terhadap KKB yang mereka benci yang selalu membuat teror dan kerusakan di Papua, dengan cara melaksanakan Pembinaan Teritorial.

10. Data dan Fakta.

Berdasarkan data/fakta, dalam pelaksanaan pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua, masih banyak ditemui permasalahan gangguan keamanan oleh KKB yang saat ini beroperasi di wilayah Papua. Sementara satuan pelaksanaan pembinaan teritorial TNI juga masih terbatas serta jauh dari yang diharapkan.

- a. Satuan Teritorial di Papua.** Berdasarkan data, terdapat Satuan Teritorial TNI dan Aparat Teritorial (Apter) di wilayah Papua, antara lain:²¹

²⁰ Robert Greene 2007, *The 33 Strategies of War*, (Jakarta, Karisma Publishing Group) hal 143,

²¹ Mabes TNI, 2022 Data Satuan Teritorial TNI

No.	MATRA	SATUAN TERITORIAL	APTER	KETERANGAN
1	TNI AD	Kodam XVII/CEN 3 Korem 12 Kodim 93 Koramil	3.327	Babinsa
		Kodam XVIII/KSR 2 Korem 10 Kodim 66 Koramil	1.117	Babinsa
2	TNI AL	Koarmada III 3 Lantamal 7 Lanal 9 Posal	73	Babinpotmar
3	TNI AU	Koopsau III 7 Lanud	34	Babinpotdirga

Gambar 2.1. Satuan Teritorial TNI di Papua

b. Pembinaan Teritorial.²² Binter mengacu kepada pemberdayaan wilayah pertahanan secara dini dalam rangka mewujudkan Ruang, Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh, masih ada beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Bidang Ketahanan Wilayah.
 - a) Penataan ruang dan wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi teritorial pertahanan masih tumpang-tindih sehingga muncul ketidakselarasan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Wilayah Pertahanan di tingkat Kotama TNI di Papua.
 - b) Masih banyak daerah tertinggal dengan lokasi terpencil, aksesibilitas rendah (transportasi dan komunikasi), tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, sosial ekonomi sulit dan informasi terbatas
 - c) Belum terlaksananya pemberdayaan wilayah untuk membantu tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pembangunan khususnya di daerah yang banyak persoalan dan mengancam kedaulatan NKRI.
- 2) Bidang Komunikasi Sosial.
 - a) Pemerintah Daerah belum dilibatkan secara aktif dalam penanganan permasalahan Papua, sehingga terkesan permasalahan Papua hanya diselesaikan oleh Satkowil TNI.

²² Mabes TNI, 2021, Laporan Program kerja Ster TNI tahun 2021, Jakarta

- b) Masih kurangnya TNI dalam melakukan komunikasi sosial (Komsos) dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dalam rangka terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat.
- c) Kurangnya Komsos bersama Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh adat yang dapat membantu penyelesaian masalah yang ada di Papua.
- 3) Bidang Bakti TNI.
- a) Penentuan sasaran program TMMD khususnya sasaran fisik belum disusun secara *bottom-up* yang dirancang untuk dapat memberikan kontribusi positif dan harus menjadi alat perekat bangsa sehingga betul-betul merupakan kebutuhan yang dirasakan masyarakat,
- b) penyelenggaraan Program Bhakti TNI di Papua belum dilakukan secara terpadu dan terencana sehingga masih membutuhkan penangan yang lebih baik bagi seluruh instansi terkait bersama masyarakat.
- 4) Bidang Kemampuan aparat Teritorial.
- a) Jumlah aparat Teritorial yang masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah binaannya, jumlah desa dan jumlah penduduknya.
- b) Kemampuan aparat Teritorial di lapangan yang masih kurang menunjukkan identitasnya sebagai prajurit rakyat, sehingga menimbulkan kesan negatif bagi masyarakat.
- c) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat Teritorial TNI di Papua pada umumnya belum terpenuhi apabila dibandingkan dengan tuntutan tugas yang dihadapi dan luasnya daerah tanggung jawabnya.

c. Gangguan Keamanan KKB di Papua. Dalam optimalisasi pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua, masih banyak ditemui permasalahan gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB kepada masyarakat sipil atau nonmiliter. Berikut disampaikan data kekejaman KKB,²³ antara lain:

- 1) 20 Februari 2022: Saat berlangsung kegiatan ibadah Minggu, KKB membakar pemukiman penduduk tidak berdosa di Distrik Omukia Kabupaten Puncak, Papua.
- 2) 2 Maret 2022: KKB membunuh karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) yang sedang menjalankan tugas untuk pembangunan masyarakat Papua. Mengakibatkan 8 orang karyawan terbunuh. Lokasi di Kampung Beoga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak berjarak sekitar 20 km dari lokasi penembakan prajurit TNI Pratu Heriyanto.
- 3) 3 Maret 2022: KKB menyerang dan menembak aparat TNI Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak yang sedang memperbaiki saluran air hingga mengakibatkan Prajurit TNI Pratu Heriyanto tertembak di bagian leher.
- 4) 26 Maret 2022: KKB menyerang dan menembak dengan senjata pelontar granat (GLM) kepada aparat TNI Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Marinir di Kwareh Bawah Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga hingga mengakibatkan Letda Mar M. Ikbal dan Pratu Mar Wilson Anderson meninggal dunia.
- 5) 22 April 2022: KKB menyerang dan menembak aparat TNI Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Marinir di Distrik Kalikote, Kabupaten Nduga hingga mengakibatkan Prajurit TNI Pratu Mar Mifanua Anyar tertembak di bagian kepala.

11. Lingkungan Strategis.

Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis secara fundamental semakin kompleks dan sulit diprediksi. Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis bila dihadapkan pada pembinaan teritorial TNI di wilayah Papua, hal ini akan berpengaruh pada pola dan bentuk dalam menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena

²³ Kasuistika, 2022, Laman 2 dari 2 - TNI Beberkan Daftar Kekejaman KKB di Papua Kurun Waktu 2018-2022 (jawapos.com) diakses 24 April 2022 pukul 20.30 Wib

itu pengaruh perkembangan lingkungan global, lingkungan regional maupun lingkungan nasional, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Global.

Dimensi permasalahan Papua yang sangat beragam, baik secara regional, maupun internasional, berpotensi besar untuk mengubah permasalahan daerah menjadi masalah nasional dan sebaliknya. Selain itu, isu Papua yang bersifat lokal dan nasional kemungkinan besar akan menjadi isu global jika menyangkut peran dan kepentingan politik dan ekonomi pihak asing.

1) Amerika Serikat (AS)

Terkait kebijakan AS terhadap Papua, menegaskan tidak akan mendukung separatisme di Papua, melainkan akan terus mendukung pelestarian NKRI dan pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Selain itu, pemerintah AS mendanai berbagai program di Papua melalui *States Agency for International Development (USAID)* dan lembaga bantuan keuangan AS seperti manajemen sumber daya alam (SDA), termasuk program-program pengembangan masyarakat (*community development*) seperti yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

2) Australia.

Peran penting Australia terhadap Papua karena Australia mempunyai pengaruh politik di antara negara-negara Pasifik Selatan. Selain itu, Australia juga berperan penting dalam pembangunan Indonesia, khususnya melalui Program Bantuan Donor Indonesia yang mencakup berbagai sektor. Terkait tinjauan peristiwa Papua, hubungan bilateral Indonesia-Australia tidak hanya melihat sikap dan reaksi negara-negara Pasifik Selatan yang secara jelas mendukung berbagai negara gerakan kemerdekaan Papua, tetapi juga bagi kelompok pendukung kemerdekaan Papua.

3) Negara-negara Pasifik Selatan

Posisi negara Pasifik Selatan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu:

Kelompok Pendukung Papua Merdeka, yaitu: Negara Kepulauan Cook (*Cook Island*), Nauru, Tuvalu dan Vanuatu. Kepentingan negara-

negara tersebut di Papua Secara antropologis, didasarkan pada hubungan etnis yang cukup dekat, khususnya *afiliasi Melanesia*. Kedekatan etnis ini menjadi salah satu sumber dukungan besar bagi upaya pembebasan Papua.²⁴

Kelompok Negara yang Abstain, yaitu: Papua Nugini (PNG) dan New Zealand (NZ). Papua Nugini dengan tegas mendukung keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, Begitu juga dengan sikap NZ adalah mendukung keutuhan NKRI. Pemerintah NZ juga memiliki program bantuan untuk pembangunan di Indonesia (program the New Zealand Aid Agency/NZAID), yang mencakup wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.

Kelompok Negara Pendukung NKRI, yaitu: Kepulauan Salomon, Republik Fiji, Kiribati dan Samoa Barat yang juga tergabung dengan Forum Negara Pasifik Selatan adalah negara-negara yang mendukung NKRI.

4) Negara-negara Uni Eropa

Negara-negara anggota Uni Eropa lebih banyak memperhatikan masalah Papua, namun, tegas mendukung penuh integritas Papua ke dalam NKRI. Inilah sikap Parlemen Uni Eropa terhadap Papua: *Pertama*, pada hakekatnya mengakui Indonesia sebagai negara kesatuan termasuk wilayah Papua. *Kedua*, mencermati berbagai kasus pelanggaran HAM, meminta Indonesia agar membentuk pengadilan pelanggaran HAM. *Ketiga*, melihat kondisi wilayah Papua namun masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dan dari 17.000 pegawai yang bekerja di Papua, kurang dari 10% adalah penduduk Suku Papua. *Keempat*, Parlemen negara-negara Uni Eropa telah mendukung Otsus untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah Papua untuk mendapatkan 80% dari pajak perikanan dan kehutanan dan 70% dari perusahaan minyak dan pertambangan.

²⁴ Ahmad Sabir, 2018, Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua, Jurnal Hubungan Internasional Tahun XI, No.1, Januari - Juni 2018, Universitas Indonesia, dikutip <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/8679/5696>, diakses 8 Maret 2022 pukul 20.00 Wib

b. Lingkungan Regional.

Selain pengaruh perkembangan global, dalam rangka optimalisasi pembinaan teritorial TNI di Wilayah Papua juga telah mempengaruhi beberapa negara di tingkat regional, antara lain:

1) Negara-negara ASEAN

Negara-negara Asia Tenggara yang terhimpun menjadi ASEAN, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Indonesia serta menolak berbagai bentuk upaya untuk mengganggu terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Sebagaimana sesuai prinsip dasar ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri (*principle of non-interference*) masing-masing negara. Sesuai prinsip tersebut, masalah Papua dianggap sebagai masalah internal Indonesia, meskipun masalah di Papua memiliki dimensi internasional.

2) Cina

Pemerintah Cina memiliki kepentingan terhadap Papua, salah satunya dengan menjalin hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan untuk memperkuat perannya di Papua. Hal ini telah menjadi perhatian bagi OPM untuk menjalin komunikasi dengan Cina, terutama bagi kepentingan politik negara yang akan datang. Misalnya, pada pertemuan tahunan Forum Pasifik yang diadakan di Kiribati pada tahun 2000, beberapa tokoh Papua yang hadir sebagai pengamat mendekati pejabat Cina yang hadir di forum tersebut. Lalu kemudian pemerintah Cina ingin memfasilitasi pertemuan tersebut yang digagas OPM di luar Indonesia.

c. Lingkungan Nasional.

Pengaruh lingkungan strategis global dan regional tentu saja dapat berpengaruh terhadap lingkungan nasional. Lingkungan nasional tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1) Geografi.

Secara geografis wilayah Papua tertelak di bagian paling timur Indonesia dengan luas wilayah 785,753 km², wilayah Papua ini telah didiami ratusan suku bangsa. Wilayah Papua juga sangat terkenal hutan hujan tropisnya, menjadi penghuni puluhan ribu tumbuhan serta

ratusan spesies tumbuhan endemik. Setelah itu, Indonesia membagi wilayah ini menjadi 2 (dua) provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Papua yang kaya sumber daya mineral logam seperti tembaga, emas dan perak menjadi tantangan pembinaan teritorial TNI terhadap masyarakat serta menjadi tantangan dalam menjaga dan mengamankan wilayah Papua oleh negara-negara lain yang akan melakukan pencurian sumber kekayaan alam.

2) Demografi

Permasalahan dalam bidang demografi di Papua menyangkut ketimpangan penyebaran, kepadatan dan komposisi penduduk, di masing-masing daerah saat ini harus mendapat perhatian lebih seksama. Ketimpangan struktur penduduk di setiap daerah dan atau antar daerah akan berpengaruh terhadap kualitas penduduk (SDM). Kepadatan penduduk yang tidak rasional jelas sebagai akibat dari penyebaran penduduk yang tidak terencana dengan baik. Penyebaran penduduk yang tidak terencana dengan baik akan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu melalui Binter diharapkan masyarakat Papua yang berada di desa-desa tidak selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Papua.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA)

Sumber Kekayaan Alam di Papua sama halnya dengan daerah lain di Indonesia yang mempunyai berbagai permasalahan. Minyak yang tadinya menjadi SKA yang sangat diandalkan namun karena berbagai keterbatasan, minyak saat ini sebagian harus diimpor. Berbagai SKA lainnya yang dimiliki Papua seperti gas alam, batu bara dan bahan tambang lain banyak dalam pengelolaan asing. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar, pencemaran sungai, laut, danau dan sejenisnya, juga menjadi sisi buruk dalam mengelola lingkungan alamnya. Dengan demikian melalui Binter di wilayah diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan pembakaran dan penebangan hutan secara liar, pencemaran sungai, laut, danau dan sejenisnya.

4) Ideologi.

Pancasila sebagai ideologi negara belakangan ini telah menghadapi banyak tantangan, terutama dengan arus globalisasi yang begitu pesat serta mendorong liberalisme masuk dengan cepat. Kebebasan individu menjadikan inti dari ajaran ini, telah mempengaruhi cara berpikir beberapa masyarakat. Penyebabnya HAM memberi kebebasan pada setiap individu dan kelompok untuk menganut ideologi yang berbeda dengan ideologi negara. Hal ini sesuai dengan kebebasan publik dan disalahartikan oleh sebagian orang sehingga menimbulkan keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila sehingga mengancam kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu diwaspadai daerah-daerah di Papua yang potensial menjadi basis gerakan separatis dan komunis serta sekaligus harus menjadi salah satu sasaran Binter bagi Satkowil TNI.

5) Politik

Janji pemerintah Belanda untuk membuat negara Papua setelah pemisahan dari negara Indonesia terjadi di pemerintah Belanda. Sebagian masyarakat yang pro-Belanda mengharapkan posisi yang cocok di negara Papua, tetapi janji ini tidak bisa terwujud karena Papua harus diserahkan ke Indonesia untuk menghormati kesepakatan yang dicapai. Meski isi perjanjian itu terdapat pasal mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri, akan tetapi pada kenyataannya Papua harus diserahkan kepada Indonesia dan disahkan oleh pejabat PBB. Menermati politik pemerintah Belanda tentu saja terus diwaspadai yang saat ini masih melekat pada sebagian masyarakat Papua, maka diharapkan bagi TNI untuk melakukan Binter agar budaya politik masyarakat Papua lebih melekat pada keutuhan NKRI.

6) Ekonomi

Perekonomian Papua pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 17,16% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02%(yoy). Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan III 2021 yang tercatat sebesar 14,89% (yoy). Secara keseluruhan, perekonomian Papua selama tahun 2021 tumbuh sebesar 15,11% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun 2020

sebesar 2,39% (yoy). Perekonomian Papua pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 17,16% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02%(yoy). Secara keseluruhan, perekonomian Papua selama tahun 2021 tumbuh sebesar 15,11% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 2,39% (yoy).

Uraian	2019					2020					2021			
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV
PDRB ADHK (Rp. Miliar)	31.806	31.936	36.218	34.606	134.566	32.229	33.250	35.248	37.061	137.787	36.957	37.738	40.497	43.419
PDRB ADHK Tanpa Tambang (Rp. Miliar)	22.644	23.581	24.117	25.299	95.641	23.259	22.397	23.105	23.631	92.392	22.503	23.137	23.767	25.290
Pertumbuhan PDRB (% yoy)	-18,70	-23,97	-15,14	-3,81	-15,79	1,33	4,12	-2,68	7,09	2,39	14,67	13,50	14,89	17,16
Pertumbuhan PDRB Tanpa Tambang (% yoy)	6,29	5,70	4,79	3,46	5,01	2,72	-5,02	-4,20	-6,59	-3,40	-3,25	3,30	2,86	7,02
Pertumbuhan PDRB (% qoq)	-80,10	0,41	13,41	-4,45	n/a	-6,87	3,17	6,01	5,14	n/a	-0,28	2,11	7,31	7,22
Pertumbuhan PDRB Tanpa Tambang (% qoq)	-75,14	4,14	2,27	4,90	n/a	-8,06	-3,71	3,16	2,28	n/a	-4,78	2,82	2,72	6,41
Pertumbuhan PDR Indonesia (% yoy)	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07	-0,70	7,07	3,51	5,02

Gambar 2.2. Perkembangan PDRB Papua, 2021

Sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi, pada Agustus 2021 jumlah penduduk yang bekerja di Papua tercatat meningkat menjadi sebesar 1,88 juta orang, sehingga mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK tercatat mengalami peningkatan dari 73,47% pada Februari 2021 menjadi 78,29% Agustus 2021.

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Papua			
Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2020	Agustus 2020	Februari 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja	2.449.941	2.449.145	2.494.062
2. Angkatan Kerja	1.837.805	1.767.403	1.832.278
Bekerja	1.774.917	1.692.745	1.763.180
Penganggur	62.888	74.658	69.098
3. Bukan Angkatan Kerja	612.136	681.742	661.784
4. TPAK (%)	75,01	72,16	73,47
Laki-Laki	84,94	79,84	83,58
Perempuan	63,77	63,47	62,06

Gambar 2.3. Penduduk usia kerja dan Angkatan kerja Papua

Aspek ekonomi dan ketenagakerjaan ini yang menjadi salah satu dari banyak alasan yang menyebabkan pemberontakan OPM. Krisis ekonomi di Indonesia begitu parah sehingga distribusi sandang dan pangan kepada masyarakat Papua terhambat. Oleh karena itu, peran TNI melakukan pembinaan teritorial sangat diperlukan khususnya

memberikan pembinaan terhadap tata cara bertani dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat Papua.

7) Sosial Budaya

Masyarakat Papua selalu memegang teguh budaya dan adat istiadat yang kuat dari leluhur nenek moyang mereka yang menjadi faktor penyebab cara berpikir masyarakat Papua tidak maju seperti masyarakat di luar Papua. Tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/sederajat adalah sebesar 80,38 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat sebesar 44,41 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/sederajat adalah sebesar 93,07 persen dan menurun hingga APK SMA/SMK/MA/sederajat sebesar 75,05 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua (persen), 2020-2021

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Participation Rates		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Participation Rates	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI Elementary School	79,27	80,38	91,27	93,07
SNP/MTs Junior High School	57,95	57,93	81,24	81,68
SMA/SMK/MA Senior High School	44,73	44,41	76,55	75,05

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Gambar 2.4. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Papua

8) Pertahanan dan Keamanan

Gangguan keamanan kelompok bersenjata yang dilakukan separatis Papua terus menunjukkan peningkatan. Selain itu, isu politik masih menunjukkan aktivitasnya dan terus berusaha menghadirkan isu-isu lokal untuk konsumsi internasional. Penyelenggaraan Pemilihan

umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2024, Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tidak disertai kepatuhan dan kedewasaan serta kematangan elit politik menimbulkan berbagai kerusuhan sosial dan konflik horizontal.

Gangguan keamanan kelompok bersenjata yang dilakukan separatis Papua terus menunjukkan peningkatan. Selain itu, isu politik masih menunjukkan aktivitasnya dan terus berusaha menghadirkan isu-isu lokal untuk konsumsi internasional. Hingga saat ini KKB terus melakukan aksi kekerasan baik kepada masyarakat maupun TNI/Polri.

Sementara itu, untuk kekuatan KKB yang beroperasi di Papua beserta pimpinan, antara lain:²⁵ (Periksa lampiran)

NO	WILAYAH	PERSONEL	SENJATA	KETERANGAN
1	KKB Pegunungan	1.182	200	
2	KKB Perbatasan	772	71	
3	KKB Pantai/MARVIC	110	18	
4	KKB Papua Barat	97	20	
	JUMLAH	2.161	309	

Gambar 2.5 Kekuatan KKB di Papua

Oleh karena itu melalui optimalisasi peran TNI dalam melakukan Binter di harapkan masyarakat tidak terhasut untuk ikut dan bergabung dengan KKB perlu terus dilakukan sehingga masyarakat Papua ke depan dapat hidup secara damai dan aman.

²⁵ Mabes TNI 2022, Data kekuatan Kelompok Separatis Teroris Satuan Intelijen (STI) BAIS TNI bulan Januari 2022, Jakarta

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Berpedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 4 disebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala berbagai bentuk ancaman. Oleh karena itu, penyelenggaraan Binter merupakan refleksi jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional yang berasal dari rakyat, dibangun dan dibesarkan oleh rakyat maka selanjutnya berjuang untuk kepentingan rakyat.

Masalah Papua bukan hanya merupakan masalah nasional akan tetapi sudah menjadi isu global jika menyangkut peran dan kepentingan politik dan ekonomi pihak asing, konflik yang memburuk dan memakan korban tidak mendapat banyak reaksi dari Amerika Serikat (AS), Australia, Negara Pasifik Selatan, Uni Eropa, Cina, dan negara-negara ASEAN.

Pembinaan teritorial memiliki peran strategis bagi penataan perikehidupan bangsa dan dapat menjadi solusi bagi pemecahan permasalahan bangsa termasuk di dalamnya permasalahan di Papua guna menjaga keutuhan NKRI. Optimalisasi Binter TNI di wilayah Papua diselenggarakan oleh Satkowil TNI harus sesuai dengan pencapaian tujuan Binter yaitu mewujudkan kemandirian TNI-Rakyat dan memberdayakan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka terciptanya RAK juang yang tangguh.

Binter TNI di wilayah Papua saat ini belum tersosialisasikan dengan baik khususnya tentang pemberdayaan wilayah pertahanan. Selain itu belum terpadunya pola pembangunan Nasional dan daerah dengan konsepsi Binter. Mengingat rumitnya permasalahan Papua, sudah dilakukan berbagai upaya namun belum mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu, upaya mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua melalui optimalisasi Binter, yang meliputi 4 (empat) program yaitu: Bintangwil, Komsos TNI, Program Bakti TNI dan Kemampuan Aparat Teritorial TNI.

13. Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil).

Pelaksanaan Bintahwil di Papua yang meliputi pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial selama ini sudah berjalan namun masih terkendala dengan adanya gangguan keamanan oleh KKB yang beroperasi di beberapa wilayah. Pengaruh beberapa negara terhadap KKB di Papua antara lain dari Negara *Cook Island*, Nauru, Tuvalu dan Vanuatu, Cina yang memiliki kepentingan terhadap Papua dan mendukung gerakan ini, sehingga mempengaruhi perannya di mata dunia dan menjadi penyemangat KKB dalam perjuangannya. Sehingga ketahanan wilayah di Papua terganggu. Bintahwil merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan di wilayah Papua melalui pemberdayaan wilayah. Menurut Teori Pemberdayaan merupakan suatu proses, suatu mekanisme, dalam hal ini, individu, organisasi dan masyarakat di suatu daerah akan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Pemberdayaan wilayah pertahanan selama ini belum mampu mengakomodasi semua kepentingan secara optimal, secara hirarkis, maupun lintas sektoral, termasuk dengan aspek pertahanan keamanan daerah. Secara geografis wilayah Papua mempunyai luas wilayah 785,753 km², dan jumlah penduduk Provinsi Papua 4.303.707 jiwa dan Papua Barat 1.209.964 yang terdiri dari ratusan suku bangsa. sehingga wilayah Papua sebagian besar merupakan kawasan hutan yang belum tersentuh pembangunannya dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). sehingga muncul ketidakselarasan RUTR dengan Wilayah Pertahanan Satkowitz TNI dengan Pemerintah Daerah. Tugas pemberdayaan wilayah pertahanan yang idealnya diarahkan untuk menunjang fungsi pertahanan dan keamanan, serta mendukung pemerintah dalam penataan wilayah guna mendukung pembangunan nasional yang diorientasikan guna mencapai kesejahteraan akhirnya menjadi terkendala. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memasukkan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) ke dalam RUTR Pemerintah Daerah karena beberapa alasan antara lain karena faktor ekonomi, hak masyarakat, nilai sosial budaya masyarakat, dan keseimbangan ekosistem.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g Perpres nomor 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara pasal 6 yang meliputi: 1) Pangkalan militer atau kesatrian; 2) Daerah latihan militer; 3) Instalasi militer; 4) Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 5) Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; 6) Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; 7) Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau 8) Kepentingan pertahanan udara.

Papua memiliki daerah yang sangat luas sehingga menjadi sangat rawan dan sulit terkontrol. Sementara itu kemampuan Satkowil dalam mengamankan wilayah Papua sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan pemberdayaan wilayah belum dapat berjalan optimal, karenanya banyak KKB yang memanfaatkan kondisi ini. Sehingga pemetaan wilayah belum bisa dilaksanakan secara maksimal. TNI perlu Menyusun peta ketahanan wilayah agar mengetahui tingkatan budaya masyarakat dari masing-masing wilayah, agar dapat memahami apa kebutuhan dari masyarakat setempat, sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan cara melaksanakan pembangunan. Data ini juga harus digunakan oleh aparat TNI khususnya bagi Satkowil untuk merebut hati masyarakat Papua dalam upaya mewujudkan keamanan.

Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, maka Papua diberikan daerah Otonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden menyediakan anggaran Rp 8,5 triliun sebagai dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam RAPBN 2022. Dana yang disiapkan ini lebih besar dibandingkan outlook APBN tahun 2021 sebesar Rp 7,6 triliun. Dana otsus Papua yang disediakan pemerintah mengambil porsi 2,25% dari Dana Alokasi Umum. Disamping itu diberikan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Namun dalam kenyataannya masih banyak desa tertinggal di Papua, yang rata-rata berada pada lokasi terpencil dan pulau-pulau kecil yang mempunyai aksesibilitas rendah yaitu transportasi dan komunikasi, tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, sosial ekonomi yang sulit dan informasi terbatas. Papua masih menjadi daerah tertinggal di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data 4.753 desa atau 87,12% dari total desa yang ada di daerah tersebut masuk dalam kategori tertinggal. BPS melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) dan diketahui terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 Distrik, 29 Kabupaten/kota. Terkait Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebagian besar Kampung di Papua termasuk dalam kategori tertinggal dan baru Sebagian kecil yang masuk dalam kategori Desa Mandiri. Jumlah penduduk miskin Papua Barat 219,07 prosentase kemiskinan 21,84% dan garis kemiskinan 631 418. Jumlah penduduk miskin Papua 920,44 prosentase kemiskinan 26,86% dan garis kemiskinan 591 959.²⁶

Berdasarkan kondisi di atas maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 8 dijelaskan bahwa memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, dengan demikian dihadapkan keberadaan Komando kewilayahan yang ada di Papua sangat efektif untuk pemberdayaan wilayah pertahanan bagi kepentingan pertahanan negara. Sehingga strategi Bintangwil di Papua adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan khususnya Desa desa tertinggal menjadi desa yang mandiri sehingga menjadi ruang juang wilayah pertahanan yang tangguh dan siap dipergunakan sebagai mandala perang untuk mendukung pertempuran. TNI membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan berupa pertanian, perikanan, perkebunan dan perikanan darat maupun air laut. *Rappaport* (1987) dalam teori Pemberdayaan Wilayah, menyatakan bahwa Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses atau mekanisme, dalam hal ini, individu, organisasi, dan komunitas di suatu wilayah dalam menangani masalah yang mereka hadapi.

²⁶ BPS Prov. Papua dan Papua Barat, 2022, Badan Pusat Statistik (bps.go.id), BPS Provinsi Papua Barat diakses 25 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

Kondisi demografi Papua juga belum menunjukkan kemajuan. Masyarakat Papua selalu memegang teguh budaya dan adat istiadat yang kuat dari leluhur mereka yang menjadi penyebab cara berpikir masyarakat Papua tidak maju seperti masyarakat di luar Papua. Antara lain malas untuk bersekolah karena beranggapan alam sudah menyediakan sesuatu buat kehidupan mereka. Tahun 2021, persentase penduduk usia 7-24 tahun di Provinsi Papua yang masih bersekolah ada sebanyak 61,90%. Sedangkan, sisanya sebanyak 16,02 % dan 22,08 % adalah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Pada periode yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua untuk tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidiyah (MI)/sederajat adalah sebesar 80,38 persen. Persentase ini semakin menurun pada setiap tingkatan pendidikan sehingga APM terendah terdapat pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat sebesar 44,41 persen. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/sederajat adalah sebesar 93,07 persen dan menurun hingga APK SMA/SMK/MA/sederajat sebesar 75,05 persen.

Berdasarkan data di atas maka Satkowil TNI Bersama sama dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat harus berupaya meningkatkan kemampuan SDM sehingga menjadi manusia yang maju yang mampu menyesuaikan dengan kemajuan jaman. Satkowil TNI menggandeng pemerintah dengan menyelenggarakan atau membantu pelaksanaan pendidikan di wilayah Papua. Dengan SDM yang mempunyai kualitas yang tinggi maka rakyat Papua akan sadar dan mudah diajak berfikir tentang KKB yang selama ini membuat teror, kekacauan dan kerusakan.

Anggaran kegiatan Bintangwil tahun 2021 sesuai data dari Ster Mabes TNI adalah sebesar Rp. 5.167.790.500,- yang meliputi:

- | | | | |
|----|------------------------|-------|-----------------|
| a. | Puldatater Trimatra | : Rp. | 355.173.000,- |
| b. | Bin RRWP TNI | : Rp. | 329.984.000,- |
| c. | Ketahanan Pangan | : Rp. | 1.037.565.000,- |
| d. | Belneg dgn Komp bangsa | : Rp. | 425.145.000,- |
| e. | Belneg dgn Masyarakat | : Rp. | 426.945.000,- |
| f. | Giat Pekan Pancasila | : Rp. | 468.925.000,- |
| g. | Serbuanter Tahwil | : Rp. | 2.124.053.500,- |

Dari data di atas terlihat bahwasanya dukungan dari Mabes TNI masih sangat kurang sehingga dibutuhkan anggaran tambahan lainnya sehingga Bintangwil dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Yang menjadi tolok ukur (Parameter) keberhasilan Bintangwil di Papua dalam pembinaan teritorial guna menjaga keutuhan NKRI adalah

- a. Geografi. Penataan sumber daya alam dan buatan, sarana prasarana serta logistik wilayah Papua dapat digunakan untuk kepentingan Pertahanan. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dapat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan serta banyak desa tertinggal di Papua berubah menjadi desa mandiri
- b. Demografi. Sumber Daya Manusia baik Orang Asli Papua (OAP) maupun pendatang mau bergabung dalam komponen cadangan dan pendukung untuk kepentingan pertahanan. Diarahkan sebagai sarana yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri apabila terjadi perang.
- c. Kondisi sosial: meningkatkan kemampuan OAP maupun pendatang menjadi manusia yang maju yang mampu menyesuaikan dengan kemajuan jaman yang memiliki semangat juang, kesadaran bela negara, berwawasan kebangsaan yang tinggi yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri

Untuk meningkatkan Bintangwil agar sesuai yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan tata ruang wilayah pertahanan (RWP) yang meliputi Pangkalan militer atau kesatrian, Daerah latihan militer, Instalasi militer, Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; Obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau Kepentingan pertahanan udara. Dan dikomunikasikan dengan Pemda agar dimasukkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
- b. Membentuk jaring teritorial dalam rangka meningkatkan kemampuan temu cepat dan lapor cepat terhadap perkembangan situasi di wilayah Papua, mengingat wilayah Papua sangat luas dan hanya didukung anggota

Satkwil TNI yang terbatas, sehingga perlu melibatkan seluruh unsur TNI/Polri serta Pemda setempat.

c. Meningkatkan kewaspadaan nasional guna mencegah berkembangnya gerakan OPM, Membuat peta dislokasi dan kekuatan KKB, Aktif melaksanakan pemetaan masyarakat dan mahasiswa yang terindikasi bergabung dalam KKB baik itu simpatisan maupun anggotanya.

d. Membuat Program Ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berupa program pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan air tawar maupun air laut.

e. Memanfaatkan teknologi informatika dalam pemetaan wilayah yang dilengkapi dengan data yang akurat tentang kondisi sosial yang meliputi geografi, Demografi dan sumber kekayaan alam serta ideologi, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

f. Membuat program migrasi penduduk antar daerah di Papua dengan mengkolaborasikan dari berbagai macam suku, agama dan ras sehingga timbul soliditas dalam bingkai NKRI.

g. Melaksanakan pemetaan dan pemantauan wilayah Papua yang berupa pulau pulau kecil, daerah hutan dan tempat terpencil yang jarang didatangi penduduk.

h. Membuat program pembinaan Rakyat Terlatih (Ratih) berupa pelatihan dasar wajib militer bagi masyarakat Papua khususnya OAP agar memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan kesadaran bela negara yang tinggi.

14. Komunikasi Sosial (Komsos) TNI

Komsos TNI dilaksanakan untuk membangun kedekatan, menyelami permasalahan, penyampaian informasi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi rasa cinta tanah air, berwawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Dalam teori Strategi Moral, menurut Mubarakhsyah dijelaskan rahasia memotivasi orang dan memelihara moral mereka adalah menjadikan mereka lebih memikirkan tentang kelompok daripada diri sendiri. Artinya bagi masyarakat Papua perlu dimotivasi dan

ditingkatkan moralnya agar lebih memikirkan tentang NKRI daripada diri sendiri sehingga mereka tidak melibatkan diri mereka bergabung dalam KKB. Yang dilaksanakan adalah dengan jalan melaksanakan Komsos.

Komsos dilaksanakan dengan masyarakat dalam hal ini Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh adat, dengan Pemerintah baik pusat maupun daerah, keluarga besar TNI dan komponen bangsa lainnya. Namun selama ini Pemerintah Daerah Papua belum dilibatkan secara aktif dalam penanganan permasalahan Papua, sehingga terkesan hanya diselesaikan oleh Satkowil TNI. Untuk itu dalam pelaksanaan pemulihan keamanan di Papua, perlu ada ketegasan rantai komando tunggal yang memadukan otoritas pemerintahan sipil dalam fungsi pemerintahan dan TNI dalam tugas pokok menghancurkan kekuatan militer KKB yang berjumlah 2.161 orang terdiri dari KKB Pegunungan 1.182 orang, KKB Perbatasan 772 orang, KKB Pantai/Marvic 110 orang, KKB Papua Barat 97 orang. Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat mencapai hasil secara efektif dan efisien, maka pengerahan Satkowil dalam tugas perbantuan kepada pemerintah daerah di masa damai perlu memberi ruang bagi pengembangan taktik militer dalam rangka tugas pokok menghancurkan KKB.

Binter TNI pada prinsipnya adalah upaya membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan di daerah. Kadang kala hal lain yang belum dipahami secara benar oleh sebagian aparat pemerintahan daerah antara lain bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara adalah sebuah instansi vertikal yang langsung dibawah pengendalian pemerintahan pusat, sehingga seringkali satuan-satuan TNI di daerah dalam melaksanakan tugasnya dipersepsi bukan bagian atau bukan dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintah daerah, termasuk penyelenggaraan Binter oleh Satkowil juga tidak jarang dipahami sebagai kewenangan pemerintah pusat. Sehingga TNI terus berupaya melakukan Komsos dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat. Meskipun Bintahwil oleh Satkowil TNI di Papua dalam melaksanakan komunikasi sosial tidak bersifat kuantitatif, namun hubungan emosional TNI dengan masyarakat terlaksana/berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi sosial.

Kemampuan Komsos bagi aparat kewilayahan sangat diperlukan sebagai media bagi aparat komando kewilayahan untuk menjalin komunikasi secara efektif dengan komponen bangsa lainnya, sehingga melalui komunikasi yang dilakukan akan terwujud suatu kesepahaman mengenai program kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh komando kewilayahan dalam rangka penyiapan potensi nasional menjadi kekuatan nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Untuk menjamin pelaksanaan komunikasi sosial yang dilaksanakan komando kewilayahan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan Komando atas, maka perlu adanya beberapa landasan pemikiran sebagai kerangka hukum dalam operasional tugas komunikasi sosial komando kewilayahan yang terdiri dari landasan operasional yaitu Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Terwujudnya kemandirian TNI-Rakyat, tidak terlepas dari upaya komunikasi sosial TNI dengan Forkompimda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anggota TNI berkomunikasi dengan para pejabat pemerintah dan masyarakat agar terjalin lebih baik sesuai bidang tugas aparat komando kewilayahan. Adapun sasarannya adalah agar para pimpinan daerah dan masyarakat paham tentang Pertahanan Negara dan upaya menangkal semua ancaman yang membahayakan mereka serta meningkatnya pemahaman dan partisipasi para pimpinan daerah dan masyarakat dalam program TNI mendukung pembangunan daerah.

Optimalisasi Binter diharapkan mampu perubahan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai Andreas Eppink: sosial budaya atau kebudayaan adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Sebab sosial budaya dapat memberikan dampak-dampak tersendiri bagi masyarakat sekitar. memantapkan penyiapan kondisi sosial sebagai kondisi juang sehingga akan memantapkan berbagai bidang kehidupan dinamis Ipoleksosbudhankam yang sangat berkorelasi langsung dengan budaya politik masyarakat. TNI menyelenggarakan Binter, dengan titik beratnya adalah mencapai tujuan dan sasaran Binter. Tentu dalam upayanya TNI akan menggunakan berbagai metoda untuk dapat merealisasikan tujuan dan sasaran Binter, Terutama metoda Binkomsos merupakan metoda yang

paling dikedepankan untuk dapat mempengaruhi *mindset* masyarakat dalam upaya meningkatkan budaya politik masyarakat yang berparadigma nasional.

Obyek pembinaan Komsos di Papua adalah masyarakat Papua itu sendiri yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Orang Asli Papua adalah bangsa Melanesia yang punya kulit warna coklat gelap, adakalanya berwarna coklat kehitam-hitaman. Rambut orang Papua sangat khas: keriting kecil-kecil, kasar, dan kering. Rambut itu tumbuh dalam rumpun-rumpun kecil. Bagi orang Papua, rambut adalah lambang keagungan. Dibanding orang Melayu, perawakan orang Papua lebih besar. Kaki mereka panjang dan kurus. Tangan dan kakinya juga lebih besar. Soal wajah, muka orang Papua lonjong. Dahi mereka datar. Sementara mulutnya lebar, bibirnya tebal, dan menonjol. Kehidupan masyarakat Papua di pedalaman saat ini kebanyakan tidak ada listrik, jalanan tidak beraspal, sinyal internet tidak ada, itulah gambaran dari Desa di pedalaman dan pulau kecil di Papua yang belum tersentuh pemerintah.

Berdasarkan data BPS Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2022, jumlah Penduduk Provinsi Papua adalah 4.303.707 jiwa dan Papua Barat 1.209.964 jiwa, memiliki keragaman tradisi dan budaya, yang hingga kini masih dilestarikan oleh suku-suku yang mendiaminya. Jumlah suku di Papua diperkirakan mencapai 255, yang masing-masing mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri dan mereka patuh dan taat kepada Kepala Adat. Agama yang ada di Papua adalah Islam 519.562 orang, Protestan 2.434.467 orang, Katolik 949.120 orang, Hindu 3.425 orang dan Budha 2.560 orang. Agama tersebut dipimpin oleh tokoh agama yang sangat dihormati dan disegani. Permasalahan yang ada di Papua selama ini hanya diselesaikan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan TNI dengan masyarakat yang terlibat dalam masalah tersebut. Peranan Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pelibatan masalah tersebut belum kelihatan.

Sesuai dengan Teori Pemberdayaan wilayah oleh *Rappaport* (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses, suatu mekanisme, dalam hal ini, individu, organisasi dan masyarakat di suatu daerah akan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sehingga perlu kiranya pelibatan Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Peran Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga

adalah melaksanakan Komsos yang dilakukan secara bertahap bertingkat dan berkelanjutan dengan menggandeng tokoh adat dan warga setempat terutama pemuda agar stabilitas keamanan di wilayah tetap terjaga. Komsos sebagai wujud kebersamaan Babinsa yang selalu hadir mendampingi warga binaannya, untuk menyelesaikan penyelesaian di tengah tengah warga binaannya dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ini merupakan tugas rutin untuk mengetahui perkembangan wilayah binaannya dan akan lebih mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat dengan jalan mendatangi dan berkomunikasi dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya dengan tujuan mnetahui apa yang menjadi keluhan warganya. Hal ini perlu ditindaklanjuti sehingga tercipta rasa kekeluargaan dan gotong royong.

Jika dilihat dari penyelenggaraan program Bintangwil oleh Satkowil TNI masih belum sejalan dengan yang diharapkan. Hal ini merupakan indikator belum tercapainya penyelenggaraan program Binter. Seharusnya program Binter dilaksanakan Satkowil TNI terlebih dahulu melakukan Komsos dengan Forkompinda Namun, pada tingkat Kodim dan Koramil serta Lanal dan Lanud, kemampuan ini sangat terbatas sehingga komunikasi terbatas pada hubungan individu. Kesulitan ini dirasakan bagi anggota TNI yang berada di lapangan, karena anggota TNI cenderung melakukan kegiatan riil yang mereka lakukan. Sehingga kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan anggota komando kewilayahan tidak menutup kemungkinan dapat pelanggaran HAM.

Anggaran kegiatan Komsos tahun 2021 sesuai data dari Ster Mabes TNI adalah sebesar Rp. 3.892.679.875,- meliputi:

- | | | | |
|----|----------------------|-------|-----------------|
| a. | Komsos dgn Kommas | : Rp. | 800.100.000,- |
| b. | Komsos dgn Kompem | : Rp. | 271.681.000,- |
| c. | Komsos Kreatif | : Rp. | 273.000.000,- |
| d. | Komsos dgn Komunitas | : Rp. | 256.695.000,- |
| e. | Majalah Mitra | : Rp. | 450.000.000,- |
| f. | Serbuanter Komsos | : Rp. | 1.841.203.875,- |

Dari data di atas terlihat bahwasanya dukungan dari Mabes TNI masih sangat kurang sehingga dibutuhkan anggaran tambahan lain agar tujuan dan sasaran Komsos dapat tercapai secara optimal.

Yang menjadi tolok ukur (Parameter) keberhasilan Komsos di Papua dalam pembinaan teritorial guna menjaga keutuhan NKRI adalah Aparat Teritorial mampu untuk membangun kedekatan, menyelami permasalahan, penyampaian informasi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat Papua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi rasa cinta tanah air, berwawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Serta mampu membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan di daerah.

Untuk meningkatkan Komsos agar sesuai dengan tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun kabupaten/kota tentang perencanaan pembangunan di wilayahnya dengan mempertimbangkan faktor pertahanan dan keamanan. Berkomitmen untuk membantu memajukan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan sesuai yang dibutuhkan masyarakat di semua sektor.
- b. Melaksanakan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat secara kontinyu dengan jalan melaksanakan silaturahmi dan anjangsana serta membantu mengatasi kesulitannya dan menyelesaikan masalah secara mufakat.
- c. Melaksanakan pendekatan kepada tokoh-tokoh KKB dengan silaturahmi secara kekeluargaan dengan tujuan mengajak Kembali ke pangkuan NKRI
- d. Membantu komunikasi antar masyarakat, adat dan agama di Papua agar terjadi interaksi dan kerukunan sehingga tidak terjadi perang antar suku sehingga terbentuklah soliditas dalam bingkai NKRI.
- e. Menghormati hukum adat, tradisi dan kearifan lokal serta yang bisa digunakan dalam membantu penyelesaian masalah khususnya terhadap KKB.
- f. Membuat posko untuk menampung permasalahan masyarakat Papua baik itu OAP maupun pendatang, serta menjadi fasilitator dalam penyelesaian masalah dengan memberikan solusi yang terbaik.
- g. Melaksanakan komunikasi dengan masyarakat untuk mencari informasi tentang KKB baik itu disposisi, dislokasi dan anggotanya serta operasi yang

akan dilaksanakan oleh KKB. Jadikan masyarakat sebagai mata dan telinga TNI.

h. Melaksanakan ceramah dan sosialisasi Bela negara dan ancaman nyata Bangsa (*Proxi War*) di Kampus-kampus Perguruan Tinggi di Papua agar tidak menjadi simpatisan maupun anggota KKB.

i. Memanfaatkan Teknologi informatika untuk penerangan kepada masyarakat Papua berupa berita, informasi dan *counter information* dari KKB sehingga terbentuk opini publik tentang TNI

j. Memantau dan mengawasi kegiatan organisasi massa dan LSM yang selama ini mendukung Papua merdeka, baik di Papua, luar Papua dan luar negeri.

15. Bakti TNI

Penyelenggaraan program Bakti TNI di Papua pada prinsipnya adalah untuk mendukung pembangunan daerah Papua. Dilaksanakan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Karya Bakti TNI, Bakti Sosial dan Penanggulangan bencana. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan Komando Kewilayahan masing-masing harus berinisiatif membangun kerjasama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, meski belum ada pedoman dari pusat, atas dasar asas *freies ermessen*, demi kepentingan umum. Hal itu seiring dengan tugas pemerintah di daerah dalam menyiapkan potensi daerah menjadi kekuatan pertahanan sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya saling terkait antar instansi. TNI telah menjalankan amanat UU terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan turut berpartisipasi dalam optimalisasi pemberdayaan wilayah melalui berbagai program pemberdayaan wilayah, salah satunya adalah Bakti TNI. Program Bakti TNI sebagai salah satu metoda pemberdayaan wilayah melalui pembinaan wilayah merupakan pelibatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan atas permintaan instansi terkait dan atau inisiatif sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapan satuan.

Di samping itu juga terdapat program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan secara fisik maupun non fisik baik berdiri sendiri maupun bersama pemerintah, Kementerian/LPNK, Pemda dan komponen bangsa lainnya secara terintegrasi dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan untuk pencapaian pembangunan di daerah pedesaan khususnya daerah tertinggal, miskin, terisolasi, terpencil, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena bencana. TMMD terdiri dari Reguler, khusus, skala besar dan imbangan. Oleh karena itu penentuan sasaran fisik program-program ini disusun secara *bottom-up* agar dengan demikian apa yang dikerjakan betul-betul merupakan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, bukan sesuatu yang dipaksakan tetapi lebih dengan mendengar apa keinginan masyarakat yang kemudian dikerjakan.

Papua adalah pulau dengan iklim tropik basah atau *tropical rain forest*. Papua memiliki curah hujan yang tinggi yakni 1.800 hingga 1.300 mm. Kondisi iklim dan geografis di Papua membuat persebaran tidak merata. Masyarakat Papua tersebar di seluruh pulau tersebut. Kelembaban di sana relatif tinggi yakni 80 sampai 89 persen. Suhunya pun beragam, yakni 19 hingga 28 derajat celsius. Papua terdiri dari perpaduan antara pegunungan, lembah, sungai, hingga pantai. Dari Puncak Jaya sebagai titik tertinggi Indonesia, hingga Kota Merauke sebagai kota terendah dengan ketinggian 40-60 di atas permukaan laut. Papua menjadi wilayah yang memiliki luas hutan terbesar dalam khazanah ekologi Indonesia dengan luas hutan mencapai 40.546.360 hektare. Terdapat 615 pulau di Provinsi Papua dan 1.945 pulau di Papua Barat. Dari kondisi geografis tersebut, maka banyak sekali penduduk yang tinggal di Kawasan hutan, pegunungan dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum tersentuh pembangunan dan masuk dalam kategori Desa Tertinggal.

Dinyatakan Rappaport (1987) dalam teori Pemberdayaan Wilayah, bahwa esensi pemberdayaan wilayah adalah membantu pemerintah menggalang kekuatan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut salah satunya sudah dilakukan oleh Satkowil melalui penyelenggaraan Bakti TNI. Penyelenggaraan Bakti TNI berpedoman Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

Bakti TNI sebagai salah satu metode Binter merupakan pelibatan TNI dalam membantu penyelenggaraan kegiatan bantuan kemanusiaan untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan instansi terkait atau inisiatif sendiri yang dikoordinasikan serta berbagai hal yang terkait dengan penyiapan wilayah pertahanan negara dan kekuatan pendukungnya yang dilaksanakan baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat lainnya. Penyelenggaraan program Bakti TNI sebagai salah satu metode Binter dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman dan mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai roh kekuatan TNI dalam melaksanakan tugasnya dirasakan masih perlu ditinjau implementasinya. Penyelenggaraan operasi bakti memang dilaksanakan untuk membantu kesulitan masyarakat diantaranya kegiatan TMMD, Manunggal Pemberantasan Buta Huruf, Manunggal KB Kesehatan, Manunggal Sosial Sejahtera dan lain-lain.

Membantu kesulitan masyarakat merupakan bentuk atau kegiatan moral sesuai yang disampaikan Mubarakhsyah dalam teori strategi moral, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan Satkowil melalui Bakti TNI maka hasilnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Namun saat ini masih ada pandangan dari aparat pemerintah bahwa Binter dalam program bakti TNI lebih kepada pemaksaan program TNI ke dalam otoritas Pemda. Implementasi program Bakti TNI, seperti program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Kuatnya upaya pembatasan oleh pemerintahan sipil terhadap peningkatan kemampuan militer karena dikaitkan dengan penerapan Binter di masa lalu, dianggap mengambil alih tugas dan fungsi utama kementerian dan lembaga pemerintah yang ada diserahkan kepada pola pikir pembuat keputusan yang belum berubah dan belum berpikir lateral, serta rendahnya kesediaan berbagi informasi atau pengetahuan. Kesepakatan bersama segenap komponen bangsa sangat diperlukan dalam menciptakan keharmonisan hubungan kerjasama antara instansi.

Dengan mengedepankan "*bottom-up planning*" secara selektif dan tepat sasaran, sehingga tercapai keterpaduan yang menyeluruh, baik perencanaan maupun pelaksanaan, serta koordinasi antar instansi yang berwenang baik antar instansi di pusat maupun di daerah. Selain itu, kerja sama dan koordinasi

kementerian dan lembaga swadaya masyarakat perlu diperkuat untuk mengintegrasikan program-programnya sehingga diharapkan dapat menyukseskan pembangunan di Papua. Program Bakti TNI Manunggal yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai pelaksanaan sangat berpengaruh dalam melaksanakan program Bakti TNI. Diakui pelaksanaan program Bakti TNI tergantung dari pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga diperlukan pendekatan khusus dari Kepala Daerah pada tiap strata melalui pendekatan komunikasi sosial sehingga diharapkan seluruh aparat Pemda dapat membantu secara maksimal.

Adanya kesepahaman cara pandang Binter akan berdampak positif terhadap kondisi keamanan di Papua lebih kondusif. Peran masing-masing Binter diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal khususnya dalam hal pengamanan di darat, laut maupun udara untuk menangkal infiltrasi dari luar dengan tujuan ingin mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya menciptakan kondisi politik yang tidak kita inginkan sehingga pada gilirannya dapat mengancam keutuhan NKRI. Program Bakti TNI ini dilaksanakan melalui pendekatan kesejahteraan berbasis masyarakat baik fisik, materil maupun spiritual, atas permintaan pemerintah daerah/instansi terkait dan/atau atas inisiatif sendiri.

Anggaran kegiatan Bakti TNI tahun 2021 sesuai data dari Ster Mabes TNI adalah sebesar Rp. 32.496.922.500,- meliputi:

- a. Giat Karbak Skala Besar di Korem 063/Sgj : Rp. 2.300.000.000,-
- b. Giat Serbuan Teritorial di Korem 072/Pmk : Rp. 2.500.000.000,-
- c. Giat Serbuan Teritorial di Korem 151/Bny : Rp. 1.000.000.000,-
- d. Giat Serbuan Teritorial di Korem 063/Sgj : Rp. 2.500.000.000,-
- e. Duk Kaporlap Satgas TMMD : Rp. 22.614.947.500,-

Dari data di atas terlihat bahwasanya dukungan dari Mabes TNI masih sangat kurang sehingga dibutuhkan anggaran tambahan dari Pemda dengan melaksanakan kegiatan Bakti TNI lainnya antara lain TMMD khusus, skala besar maupun imbang.

Yang menjadi tolok ukur (Parameter) keberhasilan Bakti TNI di Papua dalam pembinaan teritorial guna menjaga keutuhan NKRI adalah mampu mendukung

percepatan pembangunan di daerah tertinggal, miskin, hutan-hutan, pulau-pulau kecil serta daerah yang terkena bencana dengan meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan ketahanan wilayahnya.

Untuk meningkatkan tercapainya tujuan dan sasaran Bakti TNI dapat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membantu Pemda dalam membuat rencana pembangunan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan wilayah dari gangguan KKB.
- b. Program Bakti TNI di Papua berupa kegiatan TMMD pelaksanaannya perlu ditambah yang tadinya reguler setahun sekali menjadi TMMD khusus, skala besar maupun imbalanced, sehingga menjadi beberapa kali sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membantu program otonomi khusus pemerintah Papua dalam mempercepat pembangunan.
- c. TMMD agar membangun daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya sarana transportasi antar daerah dan komunikasi yang selama ini belum ada atau dalam kondisi memprihatinkan, antara lain jalan, jembatan, SPBU dan sarana penerangan.
- d. Membantu Pemerintah dalam program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Yaitu daerah hutan, daerah terpencil dan pulau-pulau kecil berpenduduk. Sarana yang dibangun antara lain jalan desa, penerangan desa, sarana kesehatan, dermaga, sarana komunikasi dan sekolah.
- e. Mewujudkan Kampung Bahari Nusantara untuk kampung yang berada di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari kluster Pendidikan, kesehatan, ekonomi, wisata dan Pertahanan keamanan.
- f. Mewujudkan kampung Pancasila yaitu kampung yang mencerminkan kehidupan berbangsa sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila dengan cerminan toleransi antar umat beragama, kerukunan antar suku dan hidup bergotong royong.
- g. Membantu pemerintah dalam menyiapkan sarana-sarana pendidikan

sekolah Dasar di tiap tiap kampung, SMP di tiap tiap Distrik serta SMA di tiap tiap kabupaten.

h. Membantu pemerintah dalam menyiapkan sarana kesehatan berupa Puskesmas di tiap tiap Distrik dan Poliklinik di kampung dan pulau pulau kecil, serta menyiapkan tenaga kesehatan yang siaga setiap saat di daerah kerjanya.

i. Menambah pos TNI di daerah yang jarang penduduknya untuk melindungi warga dari serangan KKB yang setiap saat mengancam dan melengkapi dengan senjata perorangan untuk melindungi diri serta alat komunikasi ke komando atas.

j. Membantu Pemda dalam membangun rumah adat yang merupakan sarana berkumpul kepala adat dan masyarakat, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara TNI dan masyarakat adat setempat.

16. Kemampuan Aparat Teritorial TNI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, telah dijelaskan bahwa tujuan mengatur pertahanan negara adalah melindungi dan mempertahankan kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah NKRI dari berbagai bentuk ancaman. Satkowil TNI adalah seluruh satuan TNI yang telah diterjunkan di seluruh wilayah dan bertugas melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Secara keseluruhan di Papua memiliki, Kogabwilhan, 2 Kodam yang tugas pembinaan teritorial di bawahnya terdapat 5 Korem, 22 Kodim serta 159 Koramil. Sedangkan Angkatan Laut terdapat Koarmada III yang membawahi 3 Lantamal, 7 Lanal dan ada 9 Posal. Angkatan Udara terdapat Koopsud III yang membawahi 7 Pangkalan Angkatan Udara (Lanud), dengan kekuatan Babinsa Kodam XVII/Cen 3.327 dan Kodam XVIII 1.117 orang, Babinpotmar 73 orang dan babinpotdirga 34 orang. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk sekitar 5,5 juta. Jumlah Desa di Provinsi Papua 5560 desa dan Papua Barat 1.567 desa. Berdasarkan data tersebut maka kekuatan Aparat Teritorial masih sangat kurang bila dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduk. Sehingga Satkowil TNI yang ada di Papua belum optimal dalam

pemberdayaan wilayah pertahanan. Hal tersebut disebabkan karena adanya jumlah personel yang secara kuantitas belum sesuai dengan TOP/DSPP karena selain masih kekurangan personel juga kemampuan personil. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah personel.

Masalah lain yang sering muncul dalam pelaksanaan Binter adalah kurangnya kemampuan aparat teritorial di daerah. Anggota Babinsa jumlahnya terbatas dan mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga perlu penyesuaian dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sesuai struktur organisasi Satkowil dari segi tugas pokok sudah memadai, namun dalam konteks perkembangan globalisasi saat ini perlu disempurnakan dan disesuaikan terutama kemampuan aparatnya. Di sisi lain juga masih ditemukan sikap dan perilaku aparat Binter di lapangan yang kurang menunjukkan identitasnya sebagai prajurit rakyat, sehingga menimbulkan *image* negatif bagi masyarakat. Sesuai dengan Teori Strategi moral Mubarakhsyah, Persia abad 13 dalam Bukunya *Rules of War and Bravery*. Dalam teori ini dijelaskan rahasia memotivasi orang dan memelihara moral mereka adalah menjadikan mereka lebih memikirkan tentang kelompok daripada diri sendiri Masyarakat Papua perlu dimotivasi dan ditingkatkan moralnya agar lebih memikirkan tentang NKRI daripada diri sendiri dengan melibatkan mereka dalam perjuangan memerangi KKB yang selama ini membuat terror dan meresahkan masyarakat.

Dari segi sarana dan prasarana, Satkowil TNI pada umumnya juga belum terpenuhi apabila dibandingkan dengan tuntutan tugas yang dihadapi. Papua menjadi wilayah yang memiliki luas hutan terbesar dalam khazanah ekologi Indonesia dengan luas hutan mencapai 40.546.360 hektare. Terdapat 615 pulau di Provinsi Papua dan 1.945 pulau di Papua Barat. Dari kondisi geografis tersebut, maka banyak sekali penduduk yang tinggal di Kawasan hutan, pegunungan dan pulau pulau kecil luasnya daerah tanggung jawab serta yang paling dirasakan yaitu sarana transportasi, komunikasi dan akomodasi. Sehingga memerlukan sarana khusus untuk menuju desa binaannya. Saat ini Babinsa menggunakan sarana seadanya dan memanfaatkan yang ada di wilayah tersebut.

Anggaran kegiatan Binpuanter TNI tahun 2021 sesuai data dari Ster Mabes TNI adalah sebesar Rp. 1.948.508.000,- yang meliputi:

- | | | |
|---|-------|-----------------|
| a. Susun dan cetak Bujukter | : Rp. | 265.350.000,- |
| b. Katpuanter Satkowil | : Rp. | 1.209.478.000,- |
| c. Sosialisasi dan Survey Puanter Apkowil | : Rp. | 473.680.000,- |

Dari data di atas terlihat bahwasanya dukungan dari Mabes TNI masih sangat kurang sehingga dibutuhkan anggaran tambahan agar kemampuan Aparat Teritorial TNI semakin meningkat.

Yang menjadi tolok ukur (Parameter) keberhasilan kemampuan Apter di Papua dalam pembinaan teritorial guna menjaga keutuhan NKRI adalah Aparat Teritorial mempunyai kemampuan Deteksi dini, Penerapan Manajemen Teritorial, Penguasaan Wilayah, Pembinaan Rakyat Terlatih, Komunikasi Sosial dan Sarana prasarana pendukung yang dapat menjangkau wilayah binaannya.

Untuk meningkatkan Kemampuan Aparat Teritorial TNI khususnya bagi Satkowil di Papua dengan kegiatan dan sasaran sebagai berikut:

- a. *Recruitment* anggota TNI khusus OAP, dididik di Papua dan ditugaskan sebagai Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga di wilayah Papua. OAP mendapat porsi yang banyak saat *recruitment* dengan persyaratan dan standarisasi yang berbeda dengan penduduk pendatang.
- b. Melaksanakan *recruitment* anggota TNI dari jalur agama yang merupakan saran dari Tokoh agama setempat yang selanjutnya dilaksanakan seleksi untuk dijadikan aparat teritorial di Papua sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Binter.
- c. Melaksanakan penataran kemampuan Aparat Teritorial guna meningkatkan lima kemampuan dasar teritorial antara lain

- 1) Kemampuan Deteksi dini, Kemampuan mendeteksi secara dini aparat teritorial harus dibarengi dengan kemampuan untuk mendatangi dan mendekati obyek yang menjadi sasaran yang merupakan yang tugas dan tanggung jawab aparat teritorial serta mencari untuk mendapatkan informasi dari permasalahan yang dihadapi.

- 2) Kemampuan Penerapan Manajemen Teritorial, adalah

kemampuan untuk mengambil langkah serta tindakan mulai dari perumusan rencana operasional, pembagian tugas atau perorganisasian, pengaturan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal.

3) Kemampuan Penguasaan Wilayah. Kemampuan dalam penguasaan Wilayah diharapkan untuk menentukan klasifikasi wilayah sesuai dengan perkiraan ancaman serta kemampuan untuk mencari aktor pelaku, aktor bukan pelaku serta aktor individu yang diduga menjadi penyebab terjadinya kerusuhan (provokator).

4) Kemampuan Pembinaan Rakyat Terlatih. Diharapkan Aparat teritorial mempunyai kemampuan untuk dapat mengorganisir kekuatan rakyat dan melatih rakyat menjadi kekuatan yang kemampuan kemampuan untuk mencegah serta menghadapi kemungkinan terjadinya konflik di tengah masyarakat, selain itu juga dapat digunakan sebagai tenaga bantuan operasi militer.

5) Kemampuan Komunikasi Sosial. Satkowil harus mampu menerjemahkan program pembangunan daerah ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, selain itu harus mampu menerjemahkan program pembangunan daerah ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, selain itu agen wilayah harus mampu: harus mampu: melakukan pembinaan dan memelihara kontak dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh budaya di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Tingkatkan kemampuan Aparat Teritorial dalam Bahasa daerah di tempat penugasan masing-masing sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat menyatu dengan masyarakat.

e. Penempatan Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga, yang berasal dari OAP atau orang asli daerah tersebut agar mampu melaksanakan Binter dengan baik sehingga dapat mewujudkan Ruang, alat dan kondisi juang yang Tangguh.

- f. Melengkapi peralatan khusus guna mendukung pelaksanaan Binter di Papua antara lain, perahu sebagai sarana transportasi menuju pulau-pulau kecil, sepeda motor trail untuk menembus hutan, alat komunikasi satelit untuk laporan ke komando atas.
- g. Peningkatan kemampuan aparat teritorial dalam penguasaan teknologi informatika dengan memberikan dukungan sarana informasi berbasis digital untuk mendukung tugas harian di desa binaannya.



BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan.

Papua merupakan wilayah NKRI yang merupakan Daerah Otonomi Khusus. Dalam perkembangannya situasi di Papua terdapat beberapa permasalahan dengan topik utama adalah masalah perekonomian Papua yang masih tertinggal dari wilayah lain di Indonesia dan selalu muncul konflik bahkan sampai pada isu atas pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencegah terjadinya konflik di Papua, namun sejauh ini masih terjadi gangguan keamanan oleh KKB yang menelan korban jiwa baik dari TNI/Polri maupun masyarakat sipil. Satkowil TNI di Papua telah melaksanakan upaya dalam penyelesaian konflik Papua, salah satunya dengan melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter). Namun yang dilakukan oleh Satkowil TNI tersebut belum berfungsi secara optimal karena masih saja terjadi gangguan keamanan. Agar Binter TNI di wilayah Papua optimal, maka perlu adanya peningkatan pembinaan Ketahanan wilayah, Komunikasi sosial, bakti TNI dan peningkatan kemampuan aparat Teritorial TNI.

Pembinaan Teritorial (Binter) merupakan upaya pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan oleh TNI secara perorangan, kelompok maupun satuan melalui Komsos, Bintangwil dan Bakti TNI untuk membangun kemandirian TNI-Rakyat dan Pemberdayaan wilayah pertahanan secara dini, dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang Tangguh. Beberapa simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan optimalisasi Binter TNI di wilayah Papua guna menjaga keutuhan NKRI secara keseluruhan, yaitu:

- a. Bintangwil.** Pelaksanaan Bintangwil di Papua yang meliputi pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial selama ini sudah berjalan namun masih terkendala dengan adanya gangguan keamanan oleh KKB yang beroperasi di beberapa wilayah dan adanya permasalahan lain yaitu Penataan ruang dan wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi teritorial pertahanan masih tumpang-tindih, masih banyak daerah

tertinggal dan belum terlaksananya pemberdayaan wilayah untuk membantu tugas pemerintah.

Untuk menyelesaikannya diambil Langkah-langkah antara lain Satkowil TNI menyiapkan tata ruang wilayah pertahanan Dan dikomunikasikan dengan Pemda agar dimasukkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), membentuk jaring territorial, meningkatkan kewaspadaan nasional. membuat Program Ketahanan pangan, memanfaatkan teknologi informatika dalam pemetaan wilayah, membuat program migrasi penduduk local dan pembinaan Rakyat Terlatih

b. Komsos TNI. merupakan kegiatan komunikasi TNI dengan masyarakat, Pemerintah, keluarga besar TNI dan komponen bangsa lainnya untuk membangun kedekatan, menyelami permasalahan, penyampaian informasi, mempengaruhi dan mengajak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi rasa cinta tanah air, berwawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Komsos dilakukan dalam upaya merebut hati dan pikiran rakyat Papua serta mendapatkan dukungan rakyat terhadap program pembinaan yang dilakukan oleh aparat teritorial TNI. Permasalahan yang timbul adalah Pemerintah Daerah belum dilibatkan secara aktif dalam penanganan permasalahan Papua, Masih kurangnya TNI dalam melakukan Komsos dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompimda, Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh adat yang dapat membantu penyelesaian masalah yang ada di Papua.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah berkoordinasi dengan Pemerintah tentang perencanaan pembangunan di wilayahnya, silaturahmi kepada tokoh KKB agar Kembali ke NKRI, melaksanakan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, membantu komunikasi antar masyarakat, menghormati hukum adat, tradisi dan kearifan local, mencari informasi KKB dari masyarakat, melaksanakan ceramah di Kampus kampus Perguruan Tinggi di Papua dan memanfaatkan Teknologi informatika untuk penerangan kepada masyarakat

c. Bakti TNI. Merupakan pelibatan TNI dalam membantu penyelenggaraan kegiatan bantuan kemanusiaan untuk menangani masalah-masalah sosial atas permintaan instansi terkait di Papua atau inisiatif sendiri yang dikoordinasikan serta berbagai hal yang terkait dengan penyiapan wilayah pertahanan negara dan kekuatan pendukungnya yang dilaksanakan baik secara berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan instansi terkait dan masyarakat lainnya. Permasalahan yang ditemukan adalah Penentuan sasaran program Bakti TNI belum disusun secara *bottom-up*, Program Bakti TNI di Papua belum dilakukan secara terpadu

Upaya yang dilakukan adalah membantu Pemda dalam membuat rencana pembangunan, kegiatan TMMD pelaksanaannya perlu ditambah, Bakti TNI agar membangun daerah sesuai kebutuhan masyarakat, membantu Pemerintah dalam program Nawacita, mewujudkan Kampung Bahari Nusantara, mewujudkan kampung Pancasila

d. Peningkatan Kemampuan aparat teritorial TNI. Aparat Teritorial (Apter) TNI mulai dari Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga sampai dengan pejabat Teritorial yang tergabung dalam Satkowil TNI di Papua adalah pelaksana Binter untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan menjaga keamanan negara di wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Untuk mendukung tugas pokok tersebut, Satkowil TNI dituntut agar lebih profesional dan proporsional serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas Binter. Hal-hal yang ditemukan antara lain jumlah aparat Teritorial yang masih kurang, kemampuan aparat Teritorial di lapangan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang dimiliki belum terpenuhi apabila dibandingkan.

Upaya yang dilakukan antara lain *Recruitment* anggota TNI khusus OAP, *recruitment* anggota TNI dari jalur agama, melaksanakan penataran 5 kemampuan Aparat Teritorial, Permahir kemampuan Bahasa daerah penempatan Apter dari OAP dan asli daerah, melengkapi sarana khusus Babinsa, Peningkatan kemampuan aparat teritorial dalam penguasaan teknologi informatika.

18. Rekomendasi.

Sebagai bahan masukan kepada para penentu dan pengambil kebijakan, terdapat beberapa rekomendasi yang diyakini sangat bermanfaat bagi Binter TNI di wilayah Papua, sebagai berikut:

- a. **Pemerintah** agar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan wilayah Pertahanan di wilayah Papua yang meliputi Pembinaan Ketahanan wilayah terdiri dari pembinaan geografi, Pembinaan demografi dan Pembinaan kondisi social. Komunikasi Sosial TNI dan Bakti TNI yang terdiri dari TMMD, Karya Bakti, Bakti sosial dan penanggulangan bencana untuk kepentingan pertahanan negara dari aspek darat, laut dan udara dalam rangka mewujudkan Ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh.
- b. **Pemerintah** dalam hal ini Kementerian Pertahanan membuat Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Upaya Percepatan Pembangunan di Papua dengan melaksanakan kegiatan Bakti TNI yang terdiri dari TMMD, Karya Bakti, Bakti sosial dan penanggulangan bencana. Kegiatan ini yang bertindak sebagai *leading sector* adalah Pemerintah Daerah Papua beserta dukungan anggarannya, TNI hanya membantu pelaksanaannya dengan pengerahan prajurit TNI beserta perlengkapannya.
- c. **Mabes TNI** agar melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Operasi Teritorial (Opster) TNI yang dilaksanakan oleh Satkowil TNI di Papua yang meliputi kegiatan Pembinaan Ketahanan wilayah terdiri dari pembinaan geografi dengan kegiatan pendataan dan penyiapan sumber daya buatan dan sarana prasarana serta logistik wilayah. Pembinaan demografi dengan kegiatan pendataan, dan penyiapan sumber daya manusia. Pembinaan kondisi sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan kepentingan pertahanan negara.
- d. **Mabes TNI.** Dalam rangka Opster agar kerjasama dengan Lembaga-lembaga negara dalam rangka percepatan pembangunan di Papua antara lain Kementerian Pertanian dalam rangka Ketahanan pangan, Kementerian

Kominfo dalam pembangunan sarana Telekomunikasi, Kementerian PUPR untuk sarana jalan raya, Kementerian perhubungan untuk sarana transportasi antar daerah dan antar pulau, Bank Indonesia untuk peningkatan perekonomian khususnya di pedalaman dan pulau-pulau kecil. MoU ini sebagai dasar bagi Satkowil di Wilayah Papua untuk membantu percepatan pembangunan di Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. **Satkowil TNI** berkoordinasi dengan Pemda dengan menyiapkan usulan Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RWP) agar dimasukkan dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang meliputi 1) Pangkalan militer atau kesatrian; 2) Daerah latihan militer; 3) Instalasi militer; 4) Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 5) Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; 6) Daerah disposisi amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; 7) Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau 8) Kepentingan pertahanan udara.

f. **Satkowil TNI** membentuk jaringan teritorial dalam rangka meningkatkan kemampuan temu cepat dan lapor cepat terhadap perkembangan situasi di wilayah Papua, mengingat wilayah Papua sangat luas dan hanya didukung anggota Satkowil TNI yang terbatas, sehingga perlu melibatkan seluruh unsur TNI/ Polri serta Pemda setempat. Dan selalu meningkatkan kewaspadaan nasional guna mencegah berkembangnya gerakan OPM, Membuat peta dislokasi dan kekuatan KKB, Aktif melaksanakan pemetaan masyarakat dan mahasiswa yang terindikasi bergabung dalam KKB baik itu simpatisan maupun anggotanya.

g. **Satkowil TNI** agar membuat program Pertahanan Digital bekerja sama dengan Pemda untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika digital dalam pembuatan pemetaan dan pemantauan wilayah Papua yang berupa pulau-pulau kecil, daerah hutan dan tempat terpencil serta membuat peta dislokasi dan kekuatan KKB, pemetaan masyarakat dan mahasiswa yang terindikasi bergabung dalam KKB baik itu simpatisan maupun anggotanya memantau dan mengawasi kegiatan organisasi massa dan LSM

yang selama ini mendukung Papua merdeka, baik di Papua, luar Papua dan luar negeri. dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional.

h. **Satkowil TNI** agar membuat Program Ketahanan pangan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Bersama dengan Pemda Papua melaksanakan optimalisasi peningkatan produksi pertanaman Padi dengan memanfaatkan lahan tidur, Pengembangan sagu berbasis korporasi petani, pengembangan *Integrated Farming*. Pengembangan kampung holtikultura, pengembangan desa korporasi sapi dan kambing. Disamping itu dilaksanakan peningkatan kualitas petani dengan jalan membantu Penyuluh Pertanian di Daerah.

i. **Satkowil TNI** agar membuat Program Transmigrasi Lokal antar daerah di Papua yang berkoordinasi dengan Pemda Papua dengan mengkolaborasikan berbagai macam suku OAP maupun pendatang. Program ini bertujuan untuk pemerataan dan persebaran penduduk di Papua, peningkatan taraf hidup, pengolahan sumber daya alam, penyediaan lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan di daerah, peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta peningkatan pertahanan dan keamanan nasional.

j. **Satkowil TNI** agar membuat Program Rakyat Papua Bicara yang merupakan sarana Komsos dengan bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh KKB agar Kembali ke pangkuan NKRI. Komsos ke Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dengan melaksanakan silaturahmi dan anjungsana, menghormati hukum adat, tradisi dan kearifan lokal serta membantu mengatasi kesulitannya. Melaksanakan ceramah dan sosialisasi Bela negara dan ancaman nyata Bangsa (*Proxi War*) di Kampus kampus Perguruan Tinggi di Papua, membantu komunikasi antar masyarakat, adat dan agama di Papua agar tidak terjadi perang antar suku sehingga terbentuklah soliditas dalam bingkai NKRI.

k. **Satkowil TNI** membuat Program Peduli Tanah Papua yang merupakan kegiatan Bakti TNI di Papua berupa kegiatan TMMD, karya Bakti dan Bakti Sosial. Program ini untuk membangun wilayah pelosok, hutan dan pulau

pulau kecil sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya sarana transportasi antar daerah dan komunikasi yang selama ini belum ada atau dalam kondisi memprihatinkan, antara lain jalan, jembatan, SPBU dan sarana penerangan. Menyiapkan sarana-sarana pendidikan dan kesehatan di kampung, distrik dan kabupaten. Kegiatan ini dalam rangka membantu program otonomi khusus pemerintah Papua sehingga menggunakan anggaran Pemda dan membantu Pemerintah dalam mewujudkan program Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

l. **Satkowil TNI** agar membentuk program Desa Unggulan, dengan parameter di bidang ekonomi yang ditandai dengan produksi desa, akses distribusi, akses pusat perdagangan, akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi. Bidang social yang meliputi kesehatan, pendidikan, modal social dan pemukiman. Bidang lingkungan yaitu kualitas hidup dan potensi rawan bencana. Sehingga di kampung pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dibuat Kampung Bahari Nusantara yang terdiri dari 5 kluster yaitu Pendidikan, ekonomi, kesehatan, Pariwisata dan Pertahanan keamanan. Serta dibentuk Kampung Pancasila yaitu kampung yang dijadikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila.

m. **Satkowil TNI** melaksanakan *Recruitment* anggota TNI khusus OAP, dididik di Papua dan ditugaskan sebagai Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga di wilayah Papua. OAP mendapat porsi yang banyak saat *recruitment* dengan persyaratan dan standarisasi yang berbeda dengan penduduk pendatang. Melaksanakan *recruitment* anggota TNI dari jalur agama yang merupakan saran dari Tokoh agama setempat yang selanjutnya dilaksanakan seleksi untuk dijadikan aparat territorial di papua sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Binter.

n. **Satkowil TNI** melaksanakan penataran kemampuan Aparat Territorial guna meningkatkan lima kemampuan dasar territorial antara lain Kemampuan Deteksi dini, Kemampuan Penerapan Manajemen Territorial, Kemampuan Penguasaan Wilayah, Kemampuan Pembinaan Rakyat Terlatih.

Kemampuan Komunikasi Sosial. Meningkatkan kemampuan Aparat Teritorial dalam Bahasa daerah di tempat penugasan masing-masing sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat menyatu dengan masyarakat. Melengkapi peralatan khusus guna mendukung pelaksanaan Binter di Papua antara lain, perahu sebagai sarana transportasi menuju pulau-pulau kecil, sepeda motor trail untuk menembus hutan, alat komunikasi satelit untuk laporan ke komando atas.

o. Pemerintah daerah agar menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kepentingan pertahanan dan percepatan pembangunan bidang lainnya di daerah yang memungkinkan pelibatan TNI melalui penyelenggaraan Binter terutama pembangunan sarana prasarana infrastruktur. Pada tataran Satkowil dapat mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk memadukan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD) serta Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RWP) sehingga terjadi keterpaduan antara kebutuhan kesejahteraan dan pertahanan dalam pembangunan di daerah.

p. Pemerintah Daerah agar mendukung sarana komunikasi dan informatika kepada Satkowil, melalui dinas terkait dengan membantu pemasangan sarana komunikasi dan informatika digital di wilayah Papua yang berupa pulau-pulau kecil, daerah hutan dan tempat terpencil. Serta mendata daerah-daerah yang belum terjangkau sarana komunikasi. Dengan demikian kebutuhan komunikasi dan internet dalam menyebar di seluruh wilayah Papua.

q. Pemerintah Daerah agar menyiapkan anggaran dan tenaga ahli dalam Program Ketahanan pangan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi wilayah. Dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian, peningkatan hasil padi dan sagu berbasis korporasi petani, pengembangan *Integrated Farming*. Disamping itu para petani diberikan kursus ketrampilan pertanian dan perikanan sehingga swasembada pangan dapat tercapai. TNI bersama masyarakat menggiatkan kembali pertanian, khususnya lahan pertanian padi yang jumlahnya sangat terbatas.

r. **Pemerintah Daerah** agar melaksanakan perpindahan penduduk dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dengan mengkolaborasikan berbagai macam suku OAP maupun pendatang. Penduduk yang melaksanakan transmigrasi lokal adalah penduduk yang masih hidup di alam bebas dan yang tidak punya rumah. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup, pemerataan pembangunan di daerah, peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga aman dari gangguan KKB.

s. **Pemerintah Daerah** mengeluarkan edaran kepada seluruh masyarakat agar mendukung TNI dan seruan kepada Tokoh-tokoh KKB dan anggotanya agar kembali ke pangkuan ibu Pertiwi. Dan bersama rakyat lainnya membangun tanah Papua. Aparat pemerintahan bersama TNI menampung segala permasalahan yang ada di masyarakat untuk dicarikan solusinya. Aparat pemerintahan melaksanakan silaturahmi dan anjungsana, menghormati hukum adat, tradisi dan kearifan lokal dan membantu komunikasi antar masyarakat, adat dan agama di Papua agar tidak terjadi perang antar suku.

t. **Pemerintah daerah** agar memberikan dukungan menyiapkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah untuk menyelenggarakan Pembinaan Teritorial TNI baik untuk kepentingan Kodam, Koarmada maupun Koopsud pembangunan postur Satuan Komando Kewilayahan tujuannya mendukung pembangunan di daerah sekaligus untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

u. **Pemerintah Daerah** agar mendukung program Bakti TNI di Papua berupa kegiatan TMMD, karya Bakti dan Bakti Sosial. Dengan menyiapkan anggaran pembangunan Pemda. Program pembangunan ini merupakan kegiatan Pemda yang dilaksanakan oleh TNI untuk membangun wilayah pelosok, hutan dan pulau pulau kecil. Daerah terpencil rata-rata kekurangan akses berupa jalan, jembatan dan sarana komunikasi serta belum adanya penerangan. Melalui kegiatan TMMD TNI Bersama rakyat bahu membahu

membangun desa. Disamping itu juga menyiapkan sarana-sarana pendidikan dan kesehatan di kampung, distrik dan kabupaten.

v. Pemerintah Daerah agar mengadakan kegiatan pembangunan desa sebagai Desa unggulan. Kampung-kampung di Papua dipacu pembangunannya dengan parameter di bidang ekonomi yang ditandai dengan produksi desa, akses distribusi, akses pusat perdagangan, akses lembaga keuangan, lembaga ekonomi. Bidang sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan, modal social dan pemukiman. Bidang lingkungan yaitu kualitas hidup dan potensi rawan bencana. Beberapa kampung pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dibuat Kampung Bahari Nusantara yang ditata pembangunannya dengan kluster yaitu Pendidikan, ekonomi, kesehatan, Pariwisata dan Pertahanan keamanan. Serta dibentuk Kampung Pancasila yaitu kampung yang dijadikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila.

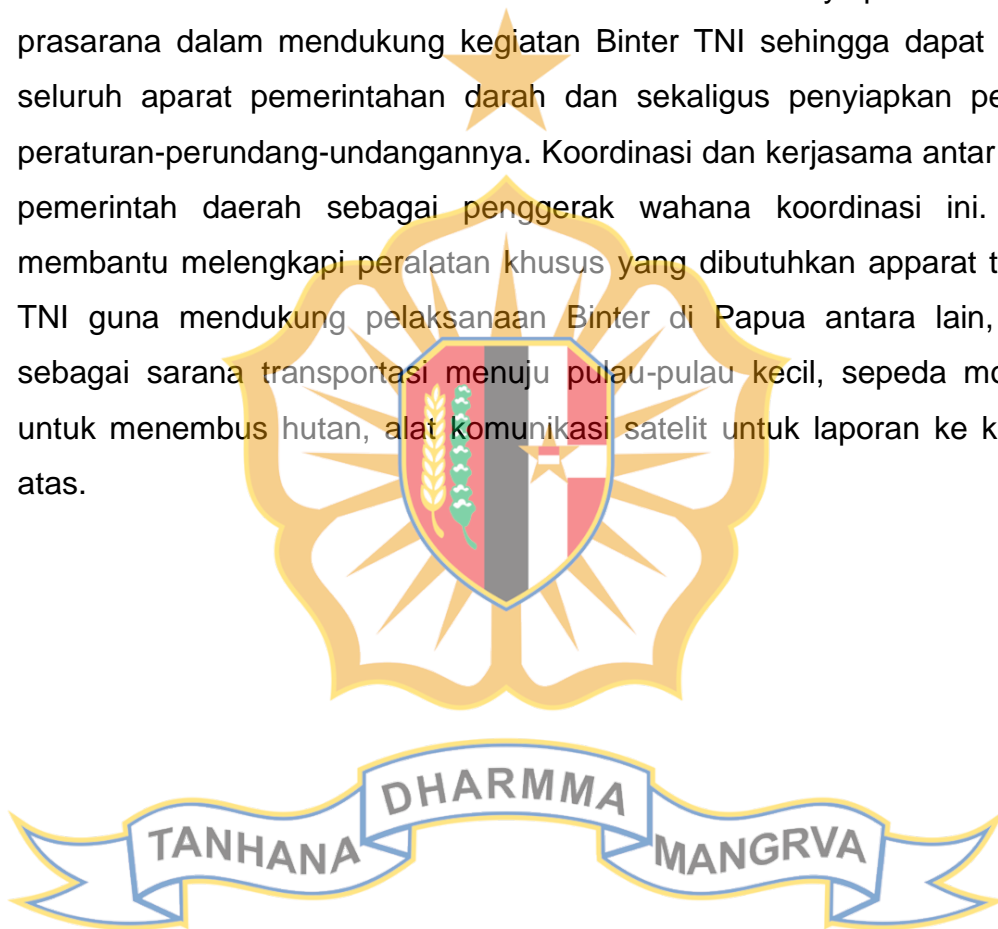
w. Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran otonomi khusus untuk mendukung penerimaan (*Recruitment*) prajurit TNI yang berasal dari Orang asli Papua (OAP), mereka berasal dari seluruh wilayah yang ada di Papua baik daratan maupun pulau pulau yang ada. Pemerintah Daerah menghimbau kepada jajarannya agar mengerahkan warganya untuk bergabung menjadi Prajurit TNI. Setelah selesai pendidikan mereka akan ditugaskan sebagai Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga di wilayah Papua.

x. Pemerintah Daerah agar memberi instruksi kepada tokoh-tokoh agama agar mengirimkan umatnya untuk bergabung menjadi Prajurit TNI. Sesuai budaya masyarakat Papua yang sangat patuh kepada tokoh agama maka akan memepermudah dalam melaksanakan pembinaan territorial. Melaksanakan *recruitment* prajurit TNI dari jalur agama merupakan saran yang sesuai untuk wilayah papua.

y. Pemerintah Daerah membantu TNI dengan menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga ahli untuk meningkatkan kemampuannya. Instansi yang terkait akan membantu sesuai permintaan dari Satkowil TNI. Kemampuan aparat territorial menyangkut lima kemampuan dasar territorial antara lain

Kemampuan Deteksi dini, Kemampuan Penerapan Manajemen Teritorial, Kemampuan Penguasaan Wilayah, kemampuan Pembinaan Rakyat Terlatih. Kemampuan Komunikasi Sosial. Di samping itu juga perlu meningkatkan kemampuan Bahasa daerah di tempat penugasan masing-masing sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat menyatu dengan masyarakat.

z. Pemerintah daerah agar mengoptimalkan forum Muspida sebagai wahana koordinasi antar instansi di daerah untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Binter TNI sehingga dapat diterima seluruh aparat pemerintahan daerah dan sekaligus menyiapkan perangkat peraturan-perundang-undangannya. Koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah daerah sebagai penggerak wahana koordinasi ini. Pemda membantu melengkapi peralatan khusus yang dibutuhkan aparat teritorial TNI guna mendukung pelaksanaan Binter di Papua antara lain, perahu sebagai sarana transportasi menuju pulau-pulau kecil, sepeda motor trail untuk menembus hutan, alat komunikasi satelit untuk laporan ke komando atas.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU no. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI

Perpres nomor 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara

Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020 s.d 2024.

Sumber Buku dan Jurnal

Mabes TNI, 2016, *Serbuan Teritorial*, Jakarta

Mabes TNI, 2022 *Data Satuan Teritorial TNI*, Jakarta

Mabes TNI, 2021, *Laporan Program kerja Ster TNI tahun 2021*, Jakarta

Mabes TNI 2022, *Data kekuatan Kelompok Separatis Teroris Satuan Intelijen (STI) BAIS TNI bulan Januari 2022*, Jakarta

Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Gerald Michaelson, 2003, *Sun Tzu for Succes*, USA, Adam Media Cooperation Robert Greene 2007, *The 33 Strategies of War*, Jakarta, Karisma Publishing Group.

Sumber Internet

Prof. Ir. Mansur Ma'shum, Ph.D., 2009, *PEMBINAAN TERITORIAL DALAM MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL* (weebly.com)

Fina Dea, 2022, *Kekhususan Provinsi Papua - Berikut Jawabannya* (rumusrumus.com)

Ariedwie Satrio, 2022, Sindonews.com, 13 Orang Tewas Akibat 7 Penyerangan Brutal KKB Papua Sepanjang 2022 (sindonews.com)

Mingseli, 2020, <https://www.mingseli.id/2020/11/pengertian-optimalisasi-menurut-para-ahli.html>

Rahmat Hidayat, 2021, Pengertian NKRI: *Latar Belakang, Tujuan, Fungsi, Bentuk dan Pentingnya Menjaga Keutuhan*, Pengertian NKRI: Latar Belakang, Tujuan, Fungsi, Bentuk dan Pentingnya Menjaga Keutuhan (wawasankebangsaan.id)

Rizal, 2018, ilmugeografi.com, Sekilas Tentang Provinsi di Papua - IlmuGeografi.com

Media Pustaka Papua, 2020, Profil Daerah Papua Barat » Media Pustaka Papua - Media Berita

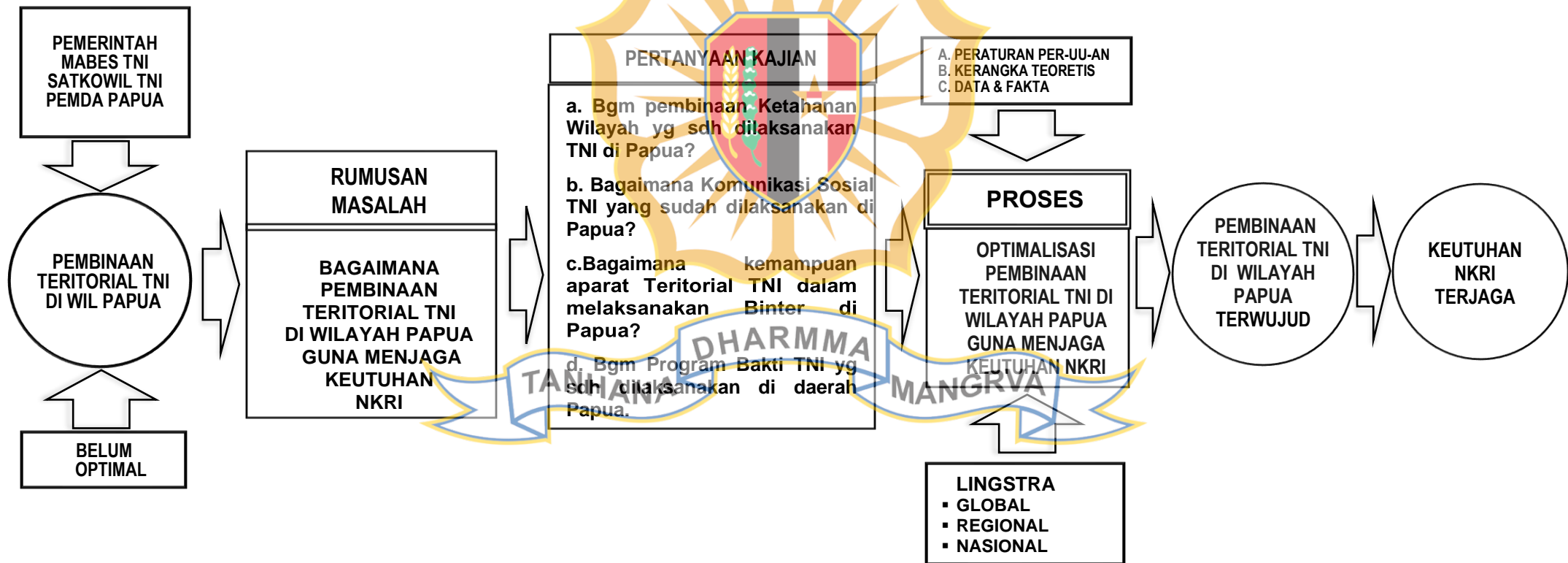
Selasar, 2022, Sosial Budaya: Pengertian, Sistem, Perubahan, Aspek & Proses (selasar.com)

Kasuistika, 2022, Laman 2 dari 2 - TNI Beberkan Daftar Kekejaman KKB di Papua Kurun Waktu 2018-2022 (jawapos.com)

Ahmad Sabir, 2018, Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua, Jurnal Hubungan Internasional Tahun XI, No.1, Januari - Juni 2018, Universitas Indonesia, dikutip <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/8679/5696>,

BPS Prov. Papua dan Papua Barat, 2022, Badan Pusat Statistik (bps.go.id), BPS Provinsi Papua Barat

OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL TNI DI WILAYAH PAPUA GUNA MENJAGA
KEUTUHAN NKRI



DISLOKASI DAN KEKUATAN KKB

DISKOMKUAT KKB PEGUNUNGAN

TOTAL

PERS: 1.182

JAT: 200

NO.	KELOMPOK	PIMPINAN	KUAT PERS & JAT	RAH OPS
1.	TINGGINERI	GOLIATH TABUNI	PERS:35 JAT: 32	YANBI, MULIA, TINGGINAMBUS & ILLU
2.	YAMBI	LEKAGAK TALENGGEN	PERS: 200 JAT: 28	YAMBI, PHILIA, MULIA, TNINGGINAMBUS
3.	NDUGAMA	EGIANUS KOGOYA	PERS: 149 JAT: 24	KUYAWAGE, YAL, YIGI, MAPENDUMA, YUGURU ATAS, PARO, ALGURU, KEYAM & BATAS BARU
4.	BALINGGA	PUROM O. WENDA	PERS: 80 JAT: 29	MAKKI, BALINGGA, PIRIME, POPOME, MALAGAY, JIWILI
5.	KALIKOPI	JACK KEMONG	PERS: 121 JAT: 10	KALIKOPI, TEMBAGAPURA, KAB.MIMIKA
6.	KEMABU	SABINUS WAKER	PERS: 32 JAT: 18	SUGAPA, UGIMBA, KALI PINDA-PINDA, TEMBAGAPURA, HITADIPA
7.	SINAK	MILITER MURIB	PERS: 32 JAT: 18	KP.UNDOME, KP.UPAGA, DIST.GOME
8.	TOTIYO	DAMIANUS M. YOGI	PERS: 300 JAT: 26	KAB. PANIAI, KAB. DOGIYAI, KAB.DEIYAI
9.	PENI MURIB	PENI MURIB	PERS: 20 JAT: 8	MUARA, KP. MAYUBERI, KP.MAKKI
10.	SELTUS WAKER	SELTUS WAKER	PERS: 20 JAT: 3	KP.TEGALOBAN, KP.TEROWONGAN, UGIMBA
11.	BENNY S MURIB	BENNY S MURIB	PERS:10 JAT: 4	KP.RUANGGI, DIST.ILAGA, KAB.PUNCAK
12.	TITUS MURIB	TITUS MURIB	PERS: 10 JAT: 4	KP.AROMAGA, DIST.OBUKIA, KAB.PUNCAK
13.	TPNPB TOLIKARA	DEMUS WENDA	PERS: 175 JAT: 6	MUARAGAME, DIST.PIRAMID, MAKKI, KONDA, BIUK, PUNCAK MEGA, TOLIKARA

DISKOMKUAT KKB PERBATASAN

TOTAL

PERS: 772

JAT: 71

NO.	KELOMPOK	PIMPINAN	KUAT PERS & JAT	RAH OPS
1.	TRWP	MATHIAS WENDA	PERS: 500 JAT: 8	KOTA JAYAPURA, KEEROM, WAMENA
2.	TPNPB KEEROM	JEFFRY BOMANAK	PERS: 30 JAT: 25	KAB. KEEROM
3.	TPNPB OKSOP	LAMEK TAPLO	PERS: 57 JAT: 12	OKSOP, KIWIROK, OKHIKA, SERAMBAKON
4.	TRWP MERAUKE	ALM.BERNADUS MAWEN	PERS: 75 JAT: 9	KP.MEMEYOP, KP.MAPLUAM, DI PESISIR SUNGAI FLE DAN SUNGAI WONAM, DI WILAYAH PNG DI BAWAH KAB.KIONGA
5.	YAHUKIMO	TANDIUS GWIJANGGE	PERS: 70 JAT: 11	DIST. DEKAI S.D DIST.SERADALA
6.	TPNPB SKOTIAUW	ABUBAKARAK WENDA	PERS: 40 JAT: 6	SKOUTIAW VANIMO, BEWANI PNG

2.

DISKOMKUAT KKB PANTAI/MARVIC

TOTAL

PERS: 110

JAT: 18

NO.	KELOMPOK	PIMPINAN	KUAT PERS & JAT	RAH OPS
1.	WPNLA	AMOS SORONDANYA	PERS: 50 JAT: 6	SENTANI, JAYAPURA, TELUK CENDERAWASIH, MANOKWARI
2.	TPNOPM MAMB. RAYA	COSMOS MAKABORI	PERS: 30 JAT: 8	KAB. MAMBERAMO RAYA
3.	TPNOPM YAPEN WAROPEN	FERNANDO WAROBAY	PERS: 30 JAT: 4	KAB. YAPEN, KAB. WAROPEN

DISKOMKUAT KKB PAPUA BARAT

TOTAL

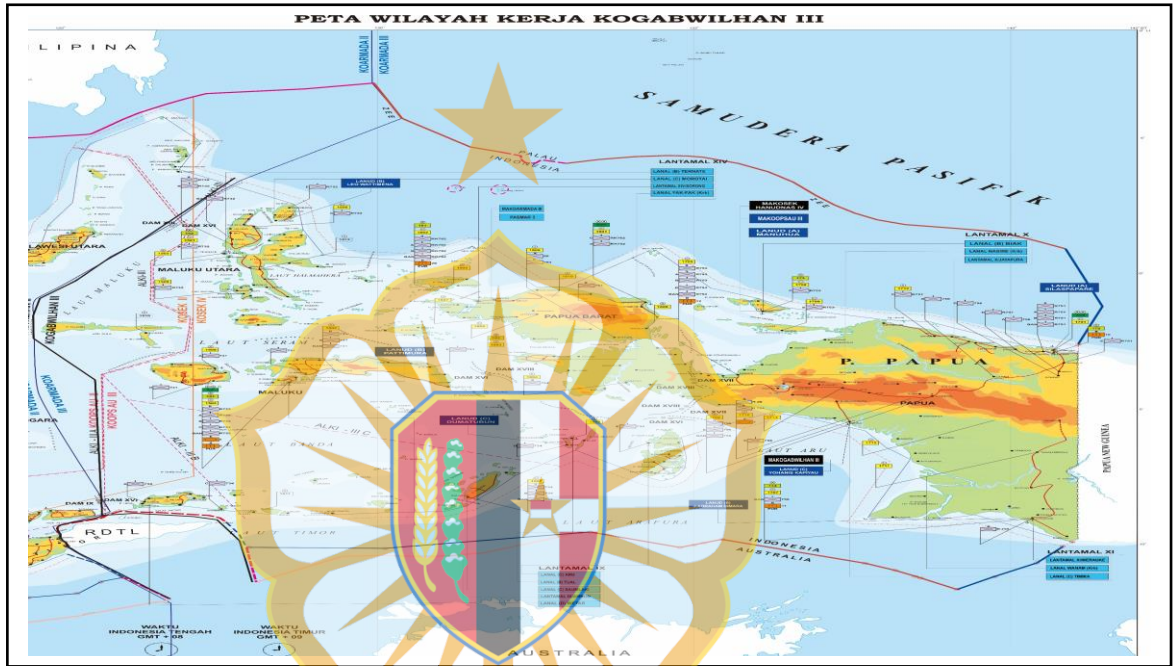
PERS: 97

JAT: 20

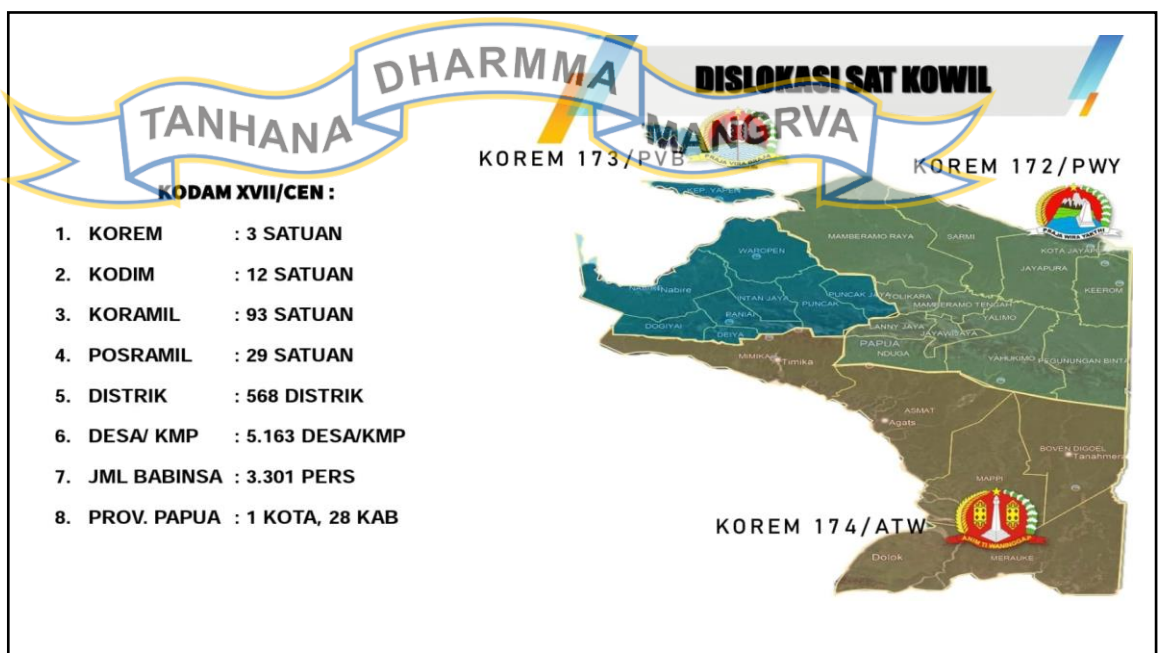
NO.	KELOMPOK	PIMPINAN	KUAT PERS & JAT	RAH OPS
1.	DENNY MOSS (AKTIF)	DENNY MOSS (PANGLIMA KODAP IV DOMBERAY)	PERS: 15 JAT: 7 Rakitan	KAB. TELUK BINTUNI
2.	ARNOLDUS JANSSEN (AKTIF)	ARNOLDUS JANSSEN KOCU	PERS: 16 JAT: 4 Rakitan, 1 AK 47 & 1 SS	KAB. MAYBRAT
3.	ISAK KLABIN (PASIF)	ISAK KLABIN (Alm)	PERS: 20 JAT: 2 Rakitan	KAB. SORONG
4.	DANIEL AWONG (PASIF)	DANIEL AWONG (Alm)	PERS: 33 JAT: 3 Rakitan	KAB. TELUK WONDAMA (WASIOR)
5.	OTIS KORIDAMA (PASIF)	OTIS KORIDAMA (Alm)	PERS: 13 JAT: 2 Rakitan	KAB. TELUK WONDAMA (WASIOR)



DAFTAR GAMBAR



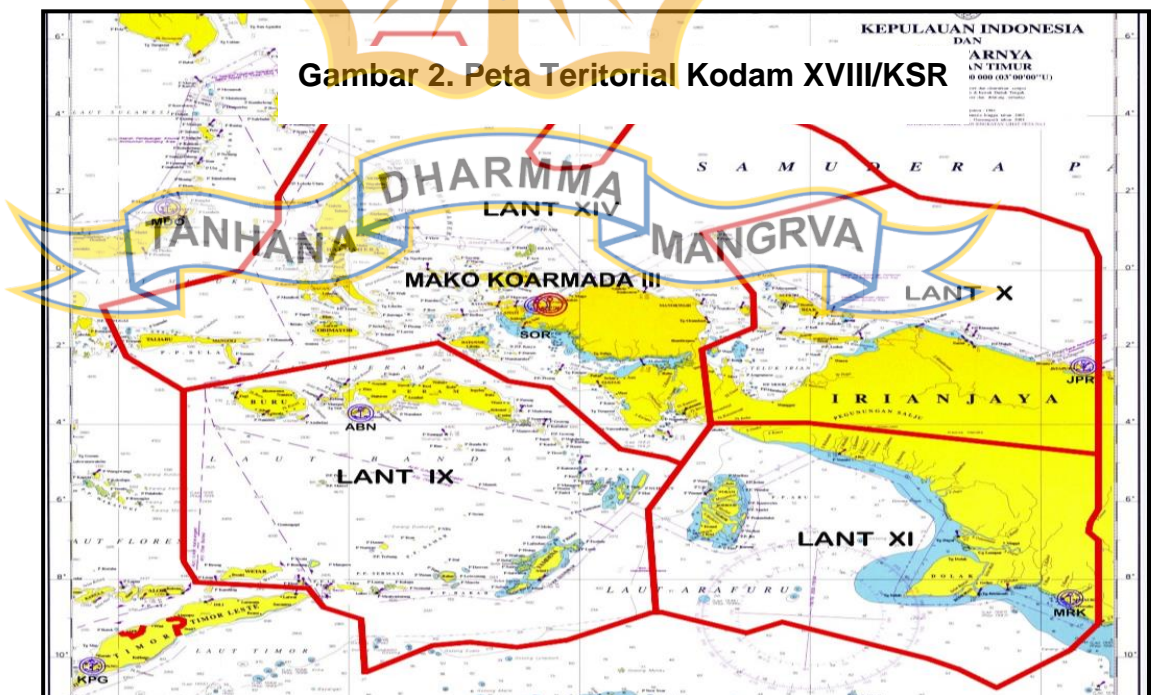
Gambar 1. Peta Teritorial Kogabwilhan III



Gambar 2. Peta Teritorial Kodam XVII/CEN



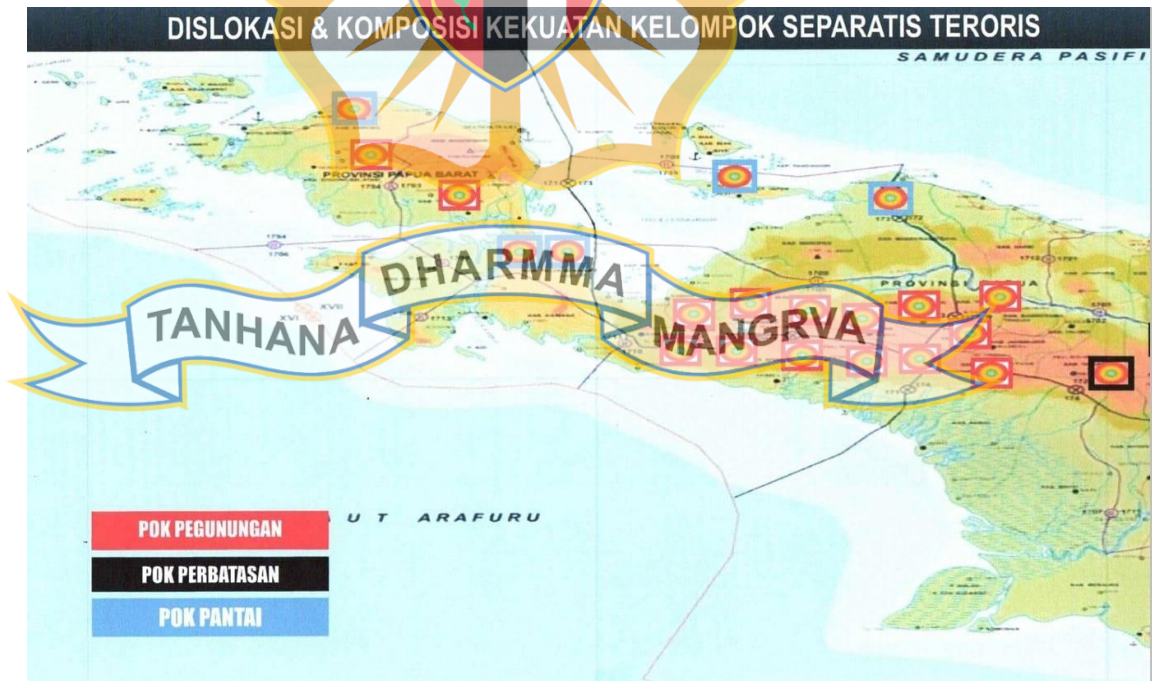
Gambar 3. Peta Teritorial Kodam XVIII/KSR



Gambar 4. Peta Teritorial Koarmada III



Gambar 4. Peta Teritorial Koopsud III



Gambar 5. Peta Dislokasi KKB

RIWAYAT HIDUP



Budiarto, S.E. dilahirkan di Rembang Jawa Tengah, pada tanggal 7 September 1970. Jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas dihabiskan seluruhnya di kota kelahirannya sampai pada tahun 1989. Kemudian, penulis mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Laut di Bumi Moro Surabaya jurusan Korps Marinir dan menyelesaikannya pada tahun 1992 dengan pangkat Letnan Dua. Lulus Dikpasis tahun 1993 dan melaksanakan tugas di satuan-satuan Marinir yang berada di Surabaya maupun di Jakarta antara lain Wakil Komandan Batalyon Marinir, Komandan Batalyon Marinir, selanjutnya menjabat di Akademi TNI. Saat berpangkat Kolonel penulis pernah menjabat sebagai Asisten Logistik Pasmar 2 Surabaya dan Asisten Logistik Korps Marinir, dan sebelum Pendidikan Lemhannas menjabat Asisten Potensi Maritim Pangkoarmada III Sorong Papua Barat. Pendidikan lanjutan yang pernah diikuti yaitu Seskoal tahun 2007, Sesko TNI tahun 2019 dan PPRA LXIII Lemhannas RI tahun 2022. Kursus-kursus yang pernah diikuti antara lain Kursus Perencanaan Dasar Operasi Ampibi, Susgati Bintel TNI, Kursus Operator dan *Maintenance* Rudal AL-1. Pendidikan Umum yang pernah dijalani adalah SMA Negeri 1 Rembang dan S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Kresna Dwipayana Jakarta. Pengalaman Penugasan luar negeri yang pernah dilaksanakan antara lain di Republik Slovakia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Australia. Di tengah masa kedinasannya Penulis menikahi istri yang bernama Ristiana, S.E. dan dikaruniai 3 orang anak terdiri dari 1 Pria dan 2 Wanita.